



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 149 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 57) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 149**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 149 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 57  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis berdasarkan ketentuan Pasal 272-273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Garut berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan

cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Garut berkaitan dengan urusan Bidang Kesehatan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada kebijakan, pagu anggaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, beserta perubahan indikator

kinerja. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Kesehatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Garut sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan

tujuan.yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut antara lain :

1. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga perencanaan lebih terarah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Garut beserta indikator kerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut merupakan salah satu Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Perangkat Daerah

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- b. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Dinas;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset Daerah Kabupaten yang digunakan oleh Dinas;
- g. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas;
- h. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- i. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

- j. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Dinas;
- k. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- m. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan rencana kerja sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- b. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan lainnya (tunjangan daerah, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan bagi guru yang belum menerima tunjangan profesi);
- d. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja sekretariat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Dinas;
- d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;
- i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat berdasarkan Rencana Strategis Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kesehatan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
- c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan keluarga dan Gizi berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi, Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;

- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan program Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan Program penanganan dan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan program upaya kesehatan lanjut usia
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu sumber daya tenaga pelayanan kesehatan anak balita, usia sekolah dan remaja serta lanjut usia;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan anak balita, usia sekolah dan remaja serta lanjut usia;

- n. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan alat dan bahan pelayanan kesehatan anak balita, usia sekolah dan remaja serta lanjut usia;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana kerja kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap sasaran kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan audit hygiene sanitasi pada media lingkungan pada program kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- i. menyiapkan bahan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan berdasarkan hasil standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi masalah kesehatan masyarakat melalui Methodology Partisipatory Assesment-Partisipatory Hygeine Sanitation Transformation (MPA-PHAST);
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL);
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi investigasi pada kejadian luar biasadan/atau keluhan dari masyarakat;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak pengelolaan pestisida;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian pengelolaan limbah medis dan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) pada sarana kesehatan;
- p. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat serta bahan pengukuran kualitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan klinik sanitasi di puskesmas;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pelayanan konseling kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat menuju Desa/Kecamatan /Kabupaten Sehat;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS);
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan penyuluhan Keamanan pangan pada pelaksanaan pelayanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan hygiene sanitasi pada pelaksanaan pelayanan depot air minum isi ulang, industri dan sarana tempat-tempat umum serta tempat pengelolaan makanan;

- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan kesehatan olahraga, tes kebugaran dan pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan kesehatan kerja melalui Pos Usaha Kesehatan Kerja;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- bb. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- cc. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- dd. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi, bina suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat (ABG) untuk mendapatkan dukungan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/unsur swasta, media massa, organisasi profesi dan lain-lain untuk penguatan sistem dan membangun kondisi yang mendukung upaya mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terfokus pada lima tatanan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pemantauan dan pengembangan desa/kelurahan siaga aktif;

- i. menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana sosialisasi, pembinaan dan evaluasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi komunikasi, informasi dan edukasi program kesehatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan Rencana Strategis Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, membawahkan:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surveilans dan imunisasi berdasarkan Rencana Kerja Bidang. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Surveilans dan Imunisasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada seksi Surveilans dan Imunisasi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum dan kebijakan teknis, strategi serta program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, infeksi emerging, serta imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional kewaspadaan dini serta respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging serta imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini serta respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging serta imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans lumpuh layuh akut/ *acute flaccid paralysis* (AFP);
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), meliputi penyakit campak, tetanus neonatorum, difteri, dan polio;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans penyakit menular dan gangguan kesehatan lainnya;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans aktif rumah sakit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan epidemiologi terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan dan gangguan kesehatan lainnya;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan surveilans kesehatan haji;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan serta penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan pada kesehatan matra situasi khusus seperti idul fitri, natal dan tahun baru serta situasi khusus lainnya;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan epidemiologi, penanggulangan, dan pencegahan penyakit dalam klasifikasi emerging;
- q. menyiapkan bahan, mengolah, serta menyusun rencana dan program kerja imunisasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang meliputi penentuan jumlah sasaran, target cakupan, kebutuhan vaksin, kebutuhan peralatan rantai dingin (cold chain), kebutuhan alat suntik dan safety box;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi suportif dan bimbingan teknis ke puskesmas berkaitan dengan imunisasi yang meliputi pengelolaan vaksin, pengelolaan rantai dingin (cold chain), peralatan imunisasi, peralatan penyimpanan vaksin dan logistik imunisasi;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang meliputi imunisasi dasar rutin, imunisasi lanjutan, dan imunisasi khusus;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- w. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- x. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan
- z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

- melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan sasaran, kebijakan umum dan kebijakan teknis, strategi serta program kerja Dinas.
  - d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - g. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung yang meliputi tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, HIV-AIDS dan penyakit menular seksual, hepatitis dan infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular langsung;
  - h. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik meliputi malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirus, vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan logistik untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonotik;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;

- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan sasaran, kebijakan umum dan kebijakan teknis, strategi serta program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pada pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penatalaksanaan penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional;

menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa serta penyalahgunaan NAPZA;

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan logistik untuk program kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- c. menyiapkan bahan, melaksanakan penyusunan dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan primer;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan serta evaluasi Pelayanan Kesehatan Primer, meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, klinik pratama, Rumah Sakit Kelas D Pratama, praktik perorangan, laboratorium klinik pratama dan pelayanan kesehatan tradisional serta pelayanan kesehatan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan, bimbingan serta evaluasi badan layanan umum daerah untuk puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pemerintah lingkup Dinas;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan tingkat puskesmas, lokakarya mini puskesmas dan penilaian kinerja puskesmas;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam menyusun dan melaksanakan program pelayanan kesehatan primer agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemenuhan kebutuhan operasional puskesmas dan jaringannya;
- k. melaksanakan fasilitasi serta membangun kemitraan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer dengan lintas sektor dan lintas program pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi lainnya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer;

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penerbitan surat izin pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, optikal, toko kaca mata dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan Rencana Kerja Bidang. Dalam melaksanakan tugas), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan rujukan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan serta evaluasi pelayanan kesehatan rujukan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam menyusun dan melaksanakan program pelayanan kesehatan rujukan agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan;
- h. melaksanakan fasilitasi serta membangun kemitraan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dengan lintas sektor dan lintas program pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kajian/saran pertimbangan teknis perizinan pendirian sarana pelayanan

kesehatan meliputi klinik dan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama, Rumah Sakit Umum Kelas D, Rumah Sakit Umum Kelas C dan Rumah Sakit Umum Kelas B;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi akreditasi sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan serta evaluasi mutu pelayanan kesehatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan;
- h. melaksanakan fasilitasi serta membangun kemitraan dalam pengelolaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi citra pelayanan prima lingkup bidang kesehatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan jaminan mutu pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat
- c. Publik; dan
- d. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Kefarmasian adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Kefarmasian berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Kefarmasian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kefarmasian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan kefarmasian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pelayanan kefarmasian meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional dan fasilitas kefarmasian lainnya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kajian dan koordinasi pengolahan proses penerbitan surat izin fasilitas kefarmasian meliputi produsen obat, produsen obat tradisional, produsen kosmetik, distributor obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan izin apotek, toko obat dan usaha mikro obat tradisional dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan sertifikasi, jaga mutu sarana kefarmasian;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, peningkatan pelayanan serta pengawasan terhadap praktik tenaga kefarmasian dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dengan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) terhadap peredaran dan pemberian izin obat dan perbekalan kesehatan lainnya;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan obat publik berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugas), Kepala Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan obat publik;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan lingkup Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat publik lingkup Dinas dan lembaga/instansi lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemusnahan serta penghapusan, sediaan farmasi yang sudah tidak memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan terhadap ketersediaan dan pengelolaansediaan farmasi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kajian dan koordinasi pengolahan proses penerbitan surat izin fasilitas sarana meliputi produsen alat kesehatan, produsen perbekalan

- kesehatan rumah tangga, distributor alat kesehatan, toko alat kesehatan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  - o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
  - q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugas , Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Dinas;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan pengelolaan tenaga kesehatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan fasilitasi seleksi, orientasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan fasilitasi seleksi, orientasi, peningkatan pengembangan serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kajian dan koordinasi pengolahan proses penerbitan surat izin praktik tenaga kesehatan dan pengobat tradisional;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengolahan kreditasi jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang.

Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.

Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

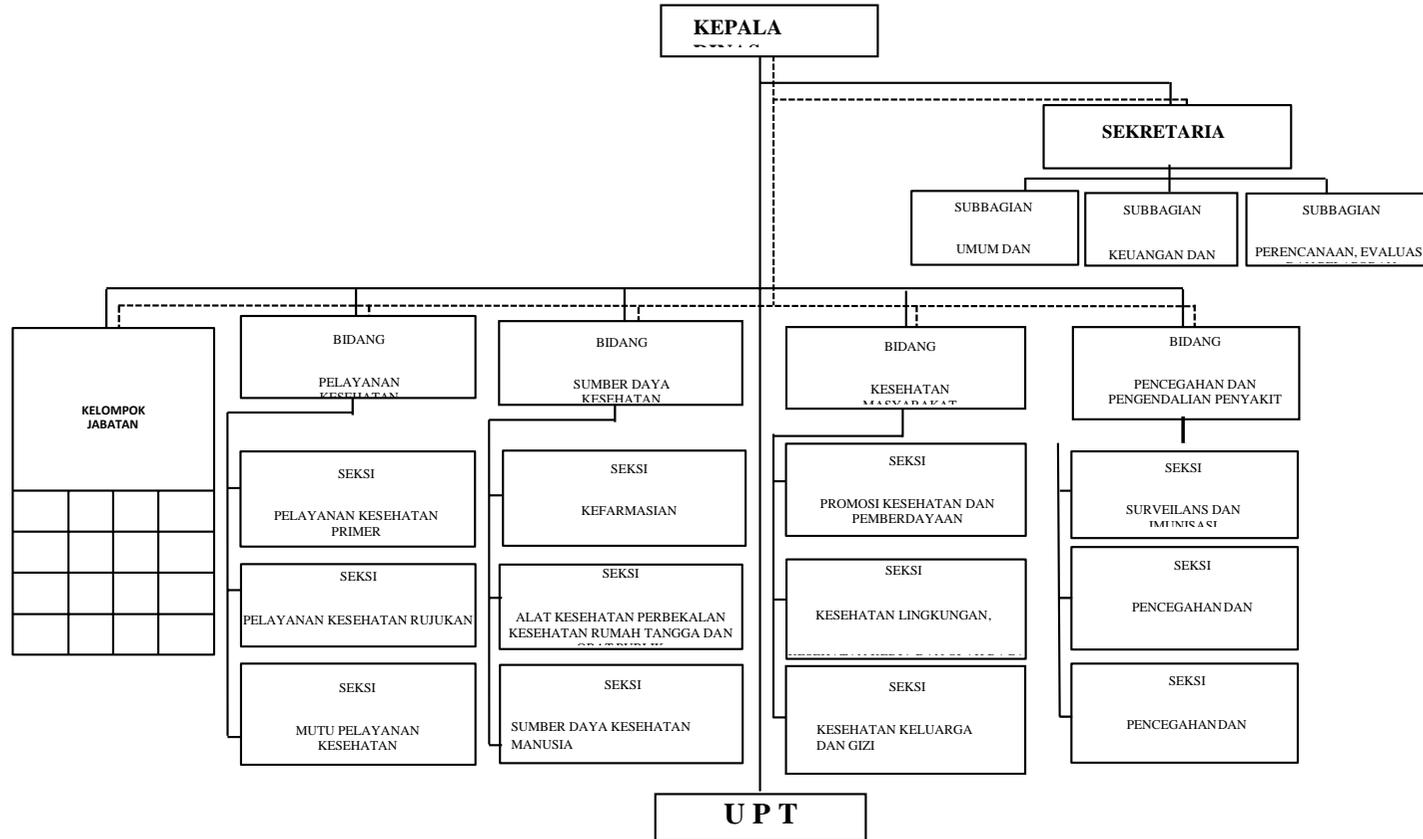
Jenis dan jenjang jabatan fungsional), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;  
dan
  - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
  - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
  - 1. Seksi Kefarmasian;
  - 2. Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
dan Obat Publik; dan
  - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



KETERANGAN :

————— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

..... = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,

Ttd

RUDY GUNAWAN

## 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas serta dapat terpenuhi secara kuantitas. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai merupakan faktor pendukung untuk membangun derajat kesehatan.

**Tabel 2. 1 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Menurut Unit Kerja Di Kabupaten Garut Tahun 2020**

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN										Jumlah
		Medis	Perawat	Bidan	Kefarmasian	Gizi	Teknis Medis	Fisioterapis	Sanitarian	Kesmas	Non Kesehatan	
1.	Dinas Kesehatan	4	17	5	8	3	0	0	3	22	36	118
2.	Puskesmas	108	975	1046	51	20	81	0	43	103	1228	3655
3.	RSUD dr. Slamet	47	586	43	31	8	23	3	8	3	268	1020
4.	RSUD Pameungpeuk	10	85	74	3	3	2	1	2	2	4	186
5.	RS Guntur	30	162	17	17	3	19	0	1	5	148	402
6.	RS Nurhayati	22	49	17	11	7	21	1	1	1	30	160
7.	RS Anisa Queen	12	28	8	7	0	13	1	2	0	13	84
8.	RS Intan Husada	29	108	10	17	0	17	1	0	1	96	279
Jumlah Kabupaten Garut		262	2010	1220	145	44	176	7	60	137	1823	5884

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Rincian jabatan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Berdasarkan Jabatan Tahun 2020**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktur Eselon II	1
2	Struktur Eselon II	5
3	Struktur Eselon II	15
4	Pejabat Fungsional	22
5	Pejabat Pelaksana/Non Eselon	35
JUMLAH		78

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2021*

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berdasarkan pada jenjang pendidikan SD hingga Sarjana S-3 sebanyak 118 orang. Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S-3	1
2	Sarjana S-2	19
3	Sarjana S-1	85
4	Diploma D-3	10
5	SLTA	3
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		118

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2021*

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki 7 (enam) unit sarana rujukan dengan kepemilikan 1 (satu) milik Pemerintah Kabupaten Garut, 1 (satu) milik TNI Angkatan Darat dan 1 (satu) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 4 (empat) Rumah Sakit Swasta. Sedangkan dari 6 (enam) Rumah Sakit tersebut baru 1 unit sebagai unit Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) dan 30 Puskesmas dengan kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED). Hal ini masih menunjukkan kekurangan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Kabupaten Garut pada Tahun 2020 sebanyak 2.585.607 jiwa. Namun demikian masih dapat terlayannya kebutuhan masyarakat dengan berbagai unit pelayanan praktek swasta yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Garut.

**Tabel 2. 4 Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2021**

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit	6	6	7
2	Puskesmas tanpa perawatan	36	34	34
3	Puskesmas dengan Ruang Rawat Inap	31	33	33
4	Puskesmas Pembantu	137	137	137
5	Pusling	134	134	134
6	Posyandu	4.104	4.221	4.221
7	Poskesdes	143	143	143
8	Apotek	167	167	167
9	Toko Obat	67	67	67
10	Klinik Pratama tanpa perawatan	109	113	113
11	Klinik Pratama dengan ruangan rawat inap	8	8	8
12	Klinik Utama tanpa perawatan	7	7	7
13	Klinik Utama dengan ruang rawat inap	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana serta perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagai pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	<b>TANAH</b>	183	<b>16.223.150.775,00</b>				
2	TANAH	183	16.223.150.775,00				
3	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>42.097</b>	<b>66.198.872.867,63</b>		<b>13.536</b>	<b>18.867.436.945,11</b>	
4	ALAT BESAR	12	684.262.976,00		83	939.407.082,01	
5	ALAT ANGKUTAN	397	18.224.560.430,00		70	3.371.219.925,00	
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	519	333.026.335,00				
7	ALAT PERTANIAN	297	211.195.943,96				
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.936	14.016.854.943,13		514	89.867.605,00	
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	368	1.214.070.753,00				
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	32.207	13.526.617.683,99		11.994	12.035.728.082,30	
11	ALAT LABORATORIUM	3.810	8.813.217.674,82		800	1.850.544.393,66	
12	ALAT PERSENJATAAN						
13	KOMPUTER	990	7.664.842.114,23		75	580.669.857,14	
14	ALAT EKSPLORASI	0	0			-	
15	ALAT PENGEBORAN	0	0			-	
16	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0			-	
17	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0			-	
18	ALAT KESELAMATAN KERJA	32	591.809.5280,00				
19	ALAT PERAGA	8	18.000.000,00				
20	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	436	327.630.330,00				
21	RAMBU RAMBU	0	0,00				
22	PERALATAN OLAH RAGA	352	572.784.103,50				
23	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>341</b>	<b>203.699.699.110,85</b>		<b>21</b>	<b>255.842.428</b>	
24	BANGUNAN GEDUNG	341	203.699.699.110,85		21	255.842.428,00	
25	MONUMEN	0	0		0	-	
26	BANGUNAN MENARA	0	0		0	-	
27	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0		0	-	
28	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	131	6.077.191.968,74				
29	JALAN DAN JEMBATAN	1	171.802.091,74				
30	BANGUNAN AIR	8	16.536.000,00				

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
31	INSTALASI	31	5.689.233.877,00				
32	JARINGAN	1	199.620.000,00				
33	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>4</b>	<b>1.698.000,00</b>		<b>4</b>	<b>1.698.000,00</b>	
34	BAHAN PERPUSTAKAAN	4	1.698.000,0		4	1.698.000,0	
35	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA						
36	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	34	9.890.555.400,00		-	-	
37	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	4			-		
38	<b>ASET LAIN - LAIN</b>				-		
39	<b>PEMINDAHTANGGAPAN</b>				<b>28.765</b>	<b>31.538.248.886,40</b>	
40	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					31.538.248.886,40	
41	<b>PEMUSNAHAN</b>				<b>22.422</b>	<b>2.803.736.116,30</b>	
42	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana				22.422	2.803.736.116,30	
		42.794	302.091.168.122,22		64.748	53.466.962.375,81	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Garut

Dinas Kesehatan mengemban tugas urusan dan kewenangan wajib otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Garut dan Bidang Kesehatan. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama 5 tahun terakhir berhubungan dengan persoalan pelayanan kesehatan. Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan merujuk pada (SPM/IKK/IKU). Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut diukur berdasarkan capaian indikator selama 5 tahun sebagai berikut :

**Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021 (s/d Oktober)	2019	2020	2021
<b>IKU</b>													
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi	100	100	100	100	100	100	97,01	97,01	97,01	93,81	97,01	97,01
2	Persentase Pencapaian Pelayanan Asuhan Berkesinambungan	100	100	100	100	100	100	79,7	72,46	70	94,43	72,46	70
3	Persentase Pencapaian Indeks Keluarga Sehat	100	100	100	40	45	50	7,44	7,9	8	99,39	7,9	8
4	Persentase Capaian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100	100	100	100	100	100	87,91	75,75	75	86,22	75,75	75
<b>SPM</b>													
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100	93,81	100	82,6	93,81	100	82,6
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	100	94,43	87,1	77,7	94,43	87,1	77,7
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	99,39	100	95,8	99,39	100	95,8
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100	86,22	85,84	71,4	86,22	85,84	71,4
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	85,02	19,77	42,7	85,02	19,77	42,7
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100	85,01	50,54	22,6	85,01	50,54	22,6
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	85,01	60,7	55,3	85,01	60,7	55,3
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	70	80	80	47,16	5,69	43,5	67,371	7,1125	43,5
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	80	80	80	29,57	18,15	65,2	36,963	22,688	65,2
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100	80,12	79,66	68,4	79,2	80,12	68,4

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021 (s/d Oktober)	2019	2020	2021
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	100	80	80	80	54,85	56,68	30,2	68,56	70,85	30,2
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100	100	100	100	100	100	86,32	88,18	44,2	86,32	88,18	44,2
<b>IKK</b>													
1	Cakupan Linakes	100	100	95	96	96	96	96,84	87,05	77,7	90,677	89,891	80,94
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	100	100	53.003	15	15	15	45	58	88	3	3,9	-
3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	100	100	50.479	95	95	95	248	210	197	2	2,61	-
4	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95		100	100	100	100	82,57	77,6	70	82,57	77,6	70
5	Cakupan Desa Siaga Aktif			100	92	100	100	108,7	100	100	108,7	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun terakhir periode Renstra dapat dilihat bahwa sebagian besar capaian indikator kesehatan telah memenuhi target, diantaranya :

1. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir
3. Persentase pelayanan kesehatan pada gizi buruk
4. Desa Siaga Aktif
5. Peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas
6. Persentase SDM Kesehatan yang memiliki ijin praktek
7. Pelayanan kesehatan ibu hamil
8. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
9. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4
10. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
11. Cakupan pelayanan nifas
12. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
13. Cakupan kunjungan bayi
14. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
15. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
16. Target/sasaran cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit penderita DBD yang ditangani
17. Target/sasaran cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
18. Target/sasaran cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
19. Target/sasaran cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
20. Target/sasaran cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
21. Target/sasaran cakupan desa siaga aktif
22. Target/sasaran cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)
23. Target/sasaran cakupan menggunakan jamban keluarga/kakus (K)
24. Target/sasaran cakupan membuang sampah pada tempatnya (S)
25. Target/sasaran cakupan penggunaan pembuangan air limbah pribadi yang memenuhi syarat kesehatan (A)
26. Target/sasaran cakupan tempat pengelolaan makanan

Adapun capaian kinerja yang masih di bawah target adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu bersalin karena adanya persepsi keluarga yang negatif mengenai persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan ibu bersalin tidak bersalin ke fasilitas kesehatan serta adanya afaktor geografis dan akses jalan yang kurang bagus.
2. Pelayanan kesehatan balita. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di puskesmas karena adanya penggantian petugas. Adanya anggapan dari masyarakat jikalau sudah dilakukan imunisasi tidak perlu datang lagi ke Posyandu juga menjadi salah satu penyebabnya.
3. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu karena banyaknya sasaran sekolah dan keterbatasan penyerapan dana BOK, sehubungan program UKS bukan program prioritas di Puskesmas.
4. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. Penyebabnya belum ada sinergitas dengan kegiatan lain dalam pelaksanaannya di Puskesmas.
5. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut karena kurangnya dukungan keluarga lansia agar lansia mendatangi Posyandu khusus untuk lansia.
6. Jumlah desa ODF
7. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Penyebabnya belum ada sinergitas dengan kegiatan lain dalam pelaksanaannya di Puskesmas.
8. Pelayanan kesehatan diabetes melitus. Penyebabnya belum ada sinergitas dengan kegiatan lain dalam pelaksanaannya di Puskesmas.
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Penyebabnya masih minimnya tenaga pengelola pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di puskesmas yang dilatih.
10. Pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi HIV. Penyebabnya adalah pelaksanaan kegiatan belum optimal karena masih bersifat

sektoral dan belum seluruh bidang bersinergi menuju pencapaian SPM serta manajemen pelayanan di puskesmas belum optimal yaitu sinergitas pelaksanaan program-program dalam pencapaian SPM.

11. Peningkatan status puskesmas TTP menjadi DTP
12. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas kesehatan
13. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
14. Jumlah puskesmas terakreditasi. Belum semua puskesmas terakreditasi karena terjadinya pandemi covid 19 sehingga proses survey akreditasi terhenti sesuai edaran dari kementerian kesehatan.
15. Jumlah puskesmas reakreditasi.
16. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Penyebabnya masih terdapat pasien TB yang diobati di fasilitas kesehatan swasta tanpa adanya konfirmasi dan tercatat di fasilitas kesehatan pemerintah serta belum semua fasilitas kesehatan swasta sesuai dengan strategi DOTS.
17. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI). Penyebabnya adalah karena adanya isu vaksin palsu dan isu vaksin haram yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat menolak untuk diimunisasi dan kompetensi petugas koordinator imunisasi belum mendapatkan pelatihan mengenai imunisasi.
18. Cakupan pelayanan anak balita. Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap capaian pelayanan anak balita yaitu kurangnya kesadaran dalam kunjungan balita ke posyandu serta pelayanan kesehatan terhadap balita belum seluruhnya dilaksanakan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi).
19. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat. Penjangkaran kesehatan siswa SD ini belum memenuhi target yang diperlukan atau hanya beberapa siswa SD dan setingkat yang menjadi sasaran penjangkaran kesehatan.
20. Target/sasaran cakupan peserta KB aktif
21. Target/sasaran cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
22. Target/sasaran cakupan penemuan dan penanganan penderita

- penyakit – penemuan penderita pneumonia balita. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pencatatan pelaporan di puskesmas karena pergantian petugas terlalu sering, pergantian pengelola program di puskesmas dan belum mendapatkan pelatihan sehingga penemuan dan penatalaksanaannya belum sesuai standar.
23. Target/sasaran cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – penemuan pasien baru TB BTA positif. Penyebabnya adalah adanya pergantian pengelola program puskesmas dan belum mendapatkan pelatihan sehingga penemuan dan penatalaksanaannya belum sesuai standar serta belum optimalnya jejaring dengan fasilitas kesehatan swasta.
  24. Target/sasaran cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – penemuan penyakit diare. Penyebabnya karena adanya pergantian pengelola program puskesmas dan belum mendapatkan pelatihan sehingga penemuan dan penatalaksanaannya belum sesuai standar serta belum optimalnya jejaring dengan fasilitas kesehatan swasta.
  25. Target/sasaran cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R). Penyebabnya karena Dinas Kesehatan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap rumah yang belum memenuhi syarat melalui penyuluhan. Adapun tindak lanjut sebagai pelaporan ke pihak terkait agar ada bantuan untuk perbaikan rumah melalui bedah rumah.
  26. Target/sasaran cakupan institusi yang dibina kesehatan lingkungannya. Penyebabnya sinergitas lintas sector terkait sanitasi belum terintegrasi secara optimal.
  27. Target/sasaran cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan. Salah satunya Kabupaten Garut belum memiliki laboratorium Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan lingkungan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan didukung dengan anggaran berbasis kinerja, yaitu setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

**Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.649.371.710	2.851.178.415		2.635.438.610	2.825.707.888		99	99		201.806.705	190.269.278
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	439.350.000	299.115.560		436.364.000	299.115.417		99	100			
Peningkatan Disiplin Aparatur	102.925.000	45.000.000		102.925.000	27.500.000		100	61			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-			-						-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	36.800.000	72.770.000		36.800.000	72.770.000		100	100		35.970.000	35.970.000
Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.143.282.700	10.883.157.000		10.050.539.059	10.751.847.964		99	99		739.874.300	701.308.905
Upaya Kesehatan Masyarakat	50.542.000.000	62.960.826.851		47.047.959.919	60.403.499.370		93	96		12.418.826.851	13.355.539.451
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	600.000.000	911.835.400		569.660.000	871.577.000		95	96		311.835.400	301.917.000
Perbaikan Gizi Masyarakat	4.510.153.615	3.998.420.600		2.948.257.425	3.722.849.700		65	93			774.592.275
Pengembangan Lingkungan sehat	500.000.000	2.370.000.000		474.809.200	2.152.029.480		95	91		1.870.000.000	1.677.220.280

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.517.234.000	7.385.861.000		5.755.905.228	5.842.906.680		88	79		868.627.000	87.001.452
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	253.810.000	44.804.500		205.573.500	44.804.500		81	100			
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	37.689.172.128	51.320.798.802		26.109.694.000	50.753.299.300		69	99		13.631.626.674	24.643.605.300
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	23.970.173.724			22.378.300.255			93				
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	11.212.000.000			10.188.859.300			91				
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	-			-						-	-
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	141.387.477.813	149.385.723.527		129.352.345.873	138.360.598.231		91	93		7.998.245.714	9.008.252.358
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru	10.014.150.000			7.378.416.504			74				
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-			-						-	-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	-			-						-	-
Upaya Pelayanan Kesehatan	5.681.790.000			5.216.654.018			92				
Mutu Pelayanan Kesehatan	5.055.178.000	3.830.680.000		4.409.915.800	2.114.039.520		87	55			
Sumber daya manusia kesehatan	200.000.000	1.560.000.000		175.600.150	644.634.572		88	41		1.360.000.000	469.034.422

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	914.800.000			776.217.939			85				
Program Sumber daya Kesehatan	36.000.000.000			19.797.098.172			55				
Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur	1.192.500.000						0				
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	-	16.230.839.000		-	13.984.550.200			86		16.230.839.000	13.984.550.200
Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga	-	88.750.000		-	83.700.000			94		88.750.000	83.700.000
Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	-	2.108.375.000		-	2.030.985.125			96		2.108.375.000	2.030.985.125
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan	-	19.662.995.475		-	18.048.175.949			92		19.662.995.475	18.048.175.949
Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Labkesda, Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	-	19.916.879.073		-	15.126.081.662			76		19.916.879.073	15.126.081.662
<b>Program Hasil Pemetaan permendagri no 90 Tahun 2019</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daeran Kabupaten /Kota			290.502.576.053			206.590.712.183			71		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			189.161.538.072			84.170.475.248			44		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Maanuasia Kesehatan			29.311.741.861			8.811.106.152			30		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			565.743.000			231.116.400			41		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang esehatan			650.562.000			225.221.000			35		

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ditampilkan dalam bentuk tabel selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai bulan oktober 2021 yang menampilkan uraian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir serta tampilan rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

Pada tabel 2.7 di atas pada Tahun 2019 - 2020 masih menggunakan program berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan program berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2021 sehingga belum bisa menghitung rata-rata pertumbuhan anggarannya.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja, Dinas Kesehatan dapat menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Dinas Kesehatan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor Internal

###### a. Kekuatan

- 1) Jumlah sarana pelayanan kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) sudah mencakup semua kecamatan;
- 2) Tersedianya sarana mobilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Tersedianya anggaran dari berbagai sumber pembiayaan kesehatan;
- 4) Komitmen dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas manajemen kesehatan;
- 5) Semua Puskesmas sudah menerapkan BLUD.

###### b. Kelemahan

- 1) Rasio Fasilitas Kesehatan yang tidak merata dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk
- 2) Belum adanya sistem informasi kesehatan yang mengakomodir penyediaan data kesehatan lengkap dan terintegrasi

- 3) *Leadership* (Kepala Puskesmas) berupa atensi terhadap program masih belum maksimal
  - 4) Pemenuhan SDMK di sebagian besar puskesmas belum sesuai standar
  - 5) Pemenuhan alat kesehatan di sebagian besar puskesmas masih di bawah standar
  - 6) Pemenuhan sarana dan prasarana di sebagian besar puskesmas belum sesuai standar
  - 7) Pencegahan stunting pada seribu hari pertama kehidupan yang belum optimal
  - 8) Upaya deteksi dini dan surveilans penyakit menular masih belum optimal
  - 9) Mitigasi bencana di bidang kesehatan belum optimal dilaksanakan
  - 10) Fasilitasi untuk pelatihan SDM Kesehatan belum optimal, sehingga masih adanya SDM Kesehatan yang kurang terampil dan membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
  - 11) Kualitas perawatan antenatal belum optimal dilaksanakan
2. Faktor Eksternal
- a. Peluang
    - 1) Memiliki kerjasama dan kemitraan baik lintas program maupun lintas sektor yang baik
    - 2) Dukungan teknologi informasi memberi peluang untuk mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan
    - 3) Komitmen dari Pemerintah Desa cukup baik dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat
    - 4) Komitmen dari Kader Kesehatan cukup baik
    - 5) Perda Kawasan Tanpa Rokok dan SE Asi Eksklusif
    - 6) Komitmen dari pihak MUI untuk bekerjasama melaksanakan sosialisasi pentingnya imunisasi
    - 7) Adanya anggaran untuk Jaminan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

b. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi yang belum sesuai dengan kemampuan Pemda untuk pengadaan jenis tenaga kesehatan
- 2) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam program JKN masih rendah yang dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan
- 3) Penonaktifan Sebagian PBI Pusat karena pemutakhiran data
- 4) Partisipasi Ibu untuk bersalin di fasilitas kesehatan belum optimal
- 5) Kualitas perawatan antenatal belum optimal di laksanakan karena kurangnya kesadaran penerima ANC
- 6) Jaminan Kesehatan yang belum semua diperoleh ibu hamil kurang mampu
- 7) Masih adanya Bayi Berat Badan Lahir Rendah karena lahir dari ibu yang memiliki komplikasi karena kurangnya persiapan pelayanan antenatal untuk mengantisipasi, PICU dan NICU yang masih kurang, serta tingkat kepatuhan dan komitmen terhadap penerapan standar KMC belum merata
- 8) Cakupan keluarga berencana yang belum optimal
- 9) Ketersediaan Pelayanan Rujukan belum merata dan belum optimal
- 10) Kolaborasi dan koordinasi jejaring kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan masih belum berjalan dengan baik
- 11) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk kondisi kesehatannya masih rendah
- 12) Beberapa penyakit tertentu diakibatkan oleh kondisi vektor penyakit sudah resistensi obat
- 13) Masih terdapat status daerah dengan tingkat endemisitas penyakit menular dan tidak menular tertentu
- 14) *Black campaign*, misalnya terhadap program imunisasi dan masih melekatnya budaya dan kepercayaan tertentu yang tidak menguntungkan bagi program kesehatan

- 15) Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam implementasi regulasi tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular belum berjalan dengan baik
- 16) Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok dalam ruangan masih rendah
- 17) Penegakan peraturan untuk merokok dalam ruangan masih rendah yang belum tegas oleh pimpinan PD
- 18) Akses terhadap sanitasi dasar belum terpenuhi dengan optimal
- 19) Pemenuhan alat kesehatan Rumah Sakit yang belum sesuai standar
- 20) Pemenuhan Tenaga Kesehatan di sebagian besar Rumah Sakit yang belum sesuai standar
- 21) Pemenuhan sarana dan prasarana di sebagian besar Rumah Sakit yang belum sesuai standar
- 22) Keterbatasan kapasitas skill dan pengetahuan SDM Kesehatan dan pemenuhan kompetensi yang belum optimal
- 23) Keterbatasan anggaran akibat keberpihakan pola penganggaran yang masih belum mematuhi amanat regulasi dua per tiga total anggaran kesehatan untuk upaya preventif dan promotif
- 24) Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM serta organisasi profesi dalam implementasi program kesehatan belum optimal

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesehatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memiliki fungsi untuk menyelenggarakan 1) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan kesenjangan kinerja yang telah dicapai dan yang direncanakan serta yang akan dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan ini dibuat. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya jumlah kematian di Kabupaten Garut	Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi masih tinggi karena cakupan pelayanan yang masih rendah	Persalinan di Faskes (minimal 4 tangan) masih 87% dibanding capaian lainnya. Masih terjadinya persalinan di rumah, di jalan, faktor budaya Aksesibilitas Pelayanan Rujukan belum merata (Pelayanan pra rujukan yang belum maksimal)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Kualitas Antenatal Care yang belum optimal (tablet tambah darah belum diminum, pengobatan teratur untuk tensi tinggi, dsb)</p> <p>Jaminan Kesehatan yang belum semua diperoleh ibu hamil kurang mampu karena waktu pengajuan (persyaratan SK Bupati yang perlu peninjauan)</p> <p>Cakupan keluarga berencana yang belum optimal</p> <p>Rasio Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk</p> <p>Rasio Puskesmas yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk</p> <p>Masih adanya kelompok masyarakat tertentu yang meminta pertolongan ke dukun karena pengetahuannya yang masih rendah atau karena faktor budaya, sehingga terjadinya keterlambatan dalam penanganan kegawatan dalam persalinan yang bisa berdampak pada kematian ibu dan anak.</p>
		Bayi Berat Badan Lahir Rendah	<p>Sebagian besar lahir dari ibu yang memiliki komplikasi (kurangnya persiapan pelayanan antenatal untuk mengantisipasi)</p> <p>PICU dan NICU yang masih kurang</p>
2	Prevalensi Stunting yang masih tinggi	Pencegahan stunting pada seribu hari pertama kehidupan yang belum optimal	<p>Masih rendahnya intervensi spesifik</p> <p>Masih rendahnya intervensi sensitive</p>
3	Masih tingginya intensitas kesakitan (insidens dan prevelansi) penyakit menular dan tidak menular yang berisiko menimbulkan kematian	Terdapatnya faktor risiko sebagai predisposing terjadinya peningkatan kasus penyakit menular berpotensi KLB atau wabah dan penyakit tidak menular	<p>Secara umum upaya preventif dengan intervensi spesifik belum maksimal</p> <p>Upaya deteksi dini dan surveilans penyakit menular masih belum optimal (kegiatan surveilan belum berjalan baik)</p> <p>Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pencegahan dan pengendalian penyakit</p> <p>Tingkat kolaborasi dan koordinasi jejaring rumpun kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan) masih belum berjalan dengan baik</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Adanya keterbatasan kapasitas skill dan pengetahuan SDM Kesehatan
			Belum sepenuhnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk penegakan diagnosa dan penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular
			Untuk beberapa penyakit tertentu kondisi vektor penyakit sudah resistensi obat
			Status daerah dengan tingkat endemisitas penyakit menular dan tidak menular tertentu
			Belum optimal dan efektifnya manajemen data melalui digitalisasi data (aplikasi)
			Rangkap tugas pekerjaan menyebabkan beban SDM Kesehatan bertambah
			Leadership (kepala puskesmas) berupa atensi terhadap program masih belum maksimal
			Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk kondisi kesehatannya yang masih kurang
			Black campaign misalnya terhadap program imunisasi dan masih melekatnya budaya dan kepercayaan tertentu yang tidak menguntungkan bagi program kesehatan
			Keterbatasan anggaran akibat keberpihakan pola penganggaran yang masih belum mematuhi amanat regulasi dua per tiga total anggaran kesehatan untuk upaya preventif dan promotif
			Implementasi regulasi tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular belum berjalan dengan baik
4	Tenaga Kesehatan yang belum sesuai dengan kebutuhan	Kuantitas tenaga kesehatan yang belum optimal (Berapa persen?)	Dinamika regulasi yang belum sesuai dengan kemampuan Pemda untuk pengadaan jenis tenaga kesehatan (hanya ASN saja)
		Kualitas tenaga kesehatan yang belum terpenuhi	Pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan yang belum optimal
5	Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Tingginya jumlah puskesmas	Pemenuhan alat kesehatan di beberapa puskesmas masih di bawah standar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		akreditasi Madya ke bawah	Pemenuhan SDMK di beberapa puskesmas belum sesuai standar
			Pemenuhan sarana dan prasarana di beberapa puskesmas belum sesuai standar
		Adanya Rumah Sakit yang belum sesuai standar	Pemenuhan alat kesehatan masih di bawah standar
			Pemenuhan SDMK belum sesuai standar
			Pemenuhan sarana dan prasarana belum sesuai standar
			Rasio Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk
		Universal Health Coverage belum optimal	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam program JKN masih rendah
Anggaran terbatas bagi masyarakat yang tidak mampu			
Penonaktifan Sebagian PBI Pusat karena pemutakhiran data			
6	Ketercapaian PHBS masih di bawah 60%	Tingginya merokok dalam ruangan	Kesadaran masyarakat
			Penegakan peraturan yang belum tegas oleh pimpinan PD
		Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat belum optimal	Belum terpenuhinya air, jamban, dan septic tank di sebagian daerah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Garut mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Garut yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu:

**“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**

Visi di atas kemudian dimaknai dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- ✓ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang terdiri dari

- Misi 1** : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
- Misi 2** : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- Misi 3** : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
- Misi 4** : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 Tujuan ke-1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sasaran ke-1.1.2 Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berperan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut**

Misi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Misi ke-1: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya	1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) sudah mencakup semua kecamatan	1. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal
	2. Tersedianya sarana mobilitas pelayanan kesehatan	2. Inprastuktur berupa jalan masih belum mendukung
	3. Tersedianya anggaran dari berbagai sumber pembiayaan kesehatan	3. Penyerapan belum optimal terkait denga regulasi.
	4. Komitmen dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas manajemen kesehatan	4. SDM yang menguasai IT terbatas
	5. Komitmen dari Pemerintah Desa cukup baik	5. Realisasi penganggaran dana desa untuk bidang kesehatan belum optimal
	6. Adanya Anggaran Jampersal	6. Masih tingginya kematian Ibu dan Bayi
	7. Adanya anggaran untuk Jaminan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	7. Anggaran untuk jaminan Kesehatan yang disediakan pemerintah daerah belum optimal

Misi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	8. Regulasi keharusan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan 100 %	8. Masih Tingginya Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
	9. Adanya Perda KTR dan SE ASI Eksklusif	9. Cakupan PHBS masih kurang dari 60 %
	10. Adanya Regulasi Stunting	10. Cakupan prevalensi stunting masih tinggi

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Kesehatan**

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat			
	a. Presentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.	Jumlah puskesmas PONED masih kurang	Faktor jarak atau geografis yang sulit dijangkau	Adanya anggaran Jampersal Adanya pembangunan puskesmas PONED
	b. Menurunnya presentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.	Pendistribusian PMT belum optimal	Beberapa wilayah geografisnya sulit dijangkau	Adanya komitmen dari kader untuk membantu mendistribusikan PMT
	c. Meningkatkan presentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih, dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.		Penerapan kebijakan belum optimal	Adanya perda KTR dan SE Asi Eksklusif
2	Meningkatnya pengendalian penyakit Meningkatnya pengendalian penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurang optimalnya upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TB, Kusta, Zoonosis, HIV/AIDS, Malaria, DBD).</li> <li>- Masih kurang optimalnya upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Stroke, penyakit jantung, kanker, gangguan jiwa).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya upaya kesehatan promotif dan preventif.</li> <li>- Masih tingginya angka kesakitan penyakit Menular maupun penyakit tidak menular.</li> <li>- Terjadinya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (Tripel Borden).</li> </ul>	Adanya Perda KTR

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	a. Presentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.	Masih rendahnya akses jamban dan air bersih	Masih rendahnya upaya kesehatan promotif dan preventif.	Adanya Pokja lintas sektor
	b. Penurunan kasus penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%	- Masih rendahnya tatakelola <i>coldchain</i> . - Masih adanya penolakan imunisasi di masyarakat	- Sarana dan prasarana untuk penyimpanan vaksin belum memadai - Adaya fatwa haram imunisasi dari komunitas tertentu	- Adanya DAK penugasan untuk pengadaan cold chain  - Adanya kotmitmendari pihak MUI untuk bekerjasama menyosialisasikan pentingnya imunisasi
	c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.	Pemenuhan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bencana dan KLB.	Belum memiliki mitigasi bencana di bidang kesehatan	Pemanfaatan teknologi untuk mitigasi bencana
	d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia $\leq 18$ tahun sebesar 5,4%.	Belum optimalnya penerapan Perda KTR	Sosialisasi belum optimal dilaksanakan	Adanya komitmen dari pemda untuk penegakan perda KTR
3	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Belum adanya grand desain/rencana induk peningkatanpengembangan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan di Kabupaten Garut	Masih ada fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar.	Komitmen untuk pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.	Sudah tercapai	-	Komitmen untuk pelaksanaan akreditasi pada puskesmas
	b. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 Kab/Kota.	Sudah tercapai		Komitmen untuk pelaksanaan akreditasi pada RSUD
4	Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan			
	a. Presentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 90%	Sudah tercapai	Ada masa tunggu dari penyedia vaksin	Adanya dukungan pendanaan dari puaat (DAK)

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang di produksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.	Bukan kewenangan pemda		
	c. Presentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.	Bukan kewenangan pemda		
5	Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan,			
	a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.	Belum meratanya tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Ada beberapa wilayah yang letak geografisnya sulit terjangkau.	Pengajuan ke pihak Pemda untuk pemberia insentif bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah sulit.
	b. Presentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.		Ketersediaan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis terbatas	Adanya WKDS, interensip dokter spesialis
	c. Jumlah SDM kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.		Belum adanya regulasi yang mengatur	
6	Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi			
	a. Meningkatnya presentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.	Belum terintegrasinya data base kesehatan kabupaten dan swasta.	Belum adanya system informasi kesehatan tingkat kabupaten	
	b. Presentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukan untuk akses pelayanan <i>e-health</i> sebesar 50%.	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi system informasi milik Kemenkes.		Sudah ada aplikasi e-profil.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat			
1	Menurunnya kematian ibu	Sarana dan prasarana di puskesmas PONED masih kurang	Faktor jarak atau geografis yang sulit dijangkau	Adanya anggaran Jampersal Adanya pembangunan puskesmas PONED
2	Menurunnya kematian bayi	Sarana dan prasarana di puskesmas PONED masih kurang	Faktor jarak atau geografis yang sulit dijangkau	Adanya anggaran Jampersal Adanya pembangunan puskesmas PONED
3	Prevalensi stunting	Alat ukur tinggi badan bayi balita masih kurang Petugas Gizi tingkat puskesmas masih kurang	Alat antropometri yang berstandar masih kurang Pengadaan SDM untuk petugas gizi dari pusat sangat minim.	Adanya DAK untuk penanganan stunting Rekrutmen petugas di gizi di Puskesmas BLUD
4	Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Masih rendahnya akses jamban dan air bersih  Petugas Kesling tingkat puskesmas masih kurang	Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan masih kurang  Pengadaan SDM untuk petugas gizi dari pusat sangat minim.	Adanya komitmen dari pokja ampl tingkat kabupaten.  Rekrutmen petugas di gizi di Puskesmas BLUD
5	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >60%	Sudah tercapai		Kolaborasi dengan lintas sector berjalan dengan optimal
6	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama keberhasilan pengobatan TBC.	Sarana untuk penemuan kasus baru masih kurang.  Petugas belum semua terlatih dalam penanganan Tb.	Pengadaan untuk mikroskop belum optimal  Petugas masih mempunyai tugas lainnya (tugas rangkap)	Adanya sarana seperti pot dahak yang disediakan pihak provinsi  Adanya DAK sekunder untuk peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan TB
7	Meningkatnya cakupan dan mutu imunisasi	Masih rendahnya tatakelola coldchain.  Masih adanya penolakan imunisasi di masyarakat	Sarana dan prasarana untuk penyimpanan vaksin belum memadai  Adanya fatwa haram imunisasi dari komunitas tertentu	Adanya DAK penugasan untuk pengadaan cold chain  Adanya komitmen dari pihak MUI untuk bekerjasama menyosialisasikan pentingnya imunisasi
8	Menurunnya penderita penyakit tidak menular & Keswa terutama	Petugas belum optimal dalam melakukan skrining	Petugas masih mempunyai tugas lainnya (tugas rangkap)	Rekrutmen petugas di puskesmas BLUD

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
	Hipertensi dan merokok.			
9	Persentase pelayanan kesehatan penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Pemenuhan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bencana dan KLB.	Belum memiliki mitigasi bencana di bidang Kesehatan	Pemanfaatan teknologi untuk mitigasi bencana
10	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Pemenuhan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bencana dan KLB.	Belum memiliki mitigasi bencana di bidang Kesehatan	Pemanfaatan teknologi untuk mitigasi bencana
11	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Pemenuhan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bencana dan KLB.	Belum memiliki mitigasi bencana di bidang Kesehatan	Pemanfaatan teknologi untuk mitigasi bencana
12	Jumlah puskesmas terakreditasi	Sudah tercapai		Adanya komitem untuk akreditasi dari puskesmas
13	Persentase kab/kota yang melaksanakan layanan layad rawat	Sarana dan prasarana layad rawat dan PSC 119 serta SDM belum cukup	SDM untuk layanan PSC Terutama dokter belum terpenuhi	Adanya DAK untuk Pemenuhan sarana dan prasarana
14	Jumlah rumah sakit terakreditasi	Rs swasta belum terakreditasi	Proses pemenuhan persyaratan akreditasi masih lambat	Adanya komitmen dari RS Swasta untuk segera melaksanakan akreditasi
15	Persentase peningkatan akses Rumah Sakit, Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Provinsi dan UPT Dinas	Rasio RS belum tercapai	Proses pembangunan RS belum optimal	Adanya DAK untuk pembangunan RS
16	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan pelayanan kesehatan di wilayah Jabar selatan dan wilayah perbatasan.	Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di garut sekatan belum merata	Faktor jarak atau geografis yang sulit dijangkau	Adanya Nusantara Sehat Adanya alokasi anggaran DAK
17	Persentase ketersediaan obat esensial	Sudah tercapai		Adanya dukungan dana dari DAK

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
18	Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju <i>universal health coverage</i>	Masih rendahnya kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Alokasi dana untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin belum mencukupi.	Kebijakan pusat tentang Banprov untuk anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
19	Persentase penguatan tenaga kesehatan di Dinkes Provinsi dan UPTD	Basis data tenaga sesuai kompetensi belum akurat.	Masih banyaknya tenaga kesehatan yang merangkap jabatan antara lain dengan jabatan bendahara.	Adanya pelatihan atau uji kompetensi.
20	Persentase dukungan sistem informasi kesehatan tingkat provinsi	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi system informasi milik provinsi	Belum adanya system informasi kesehatan tingkat kabupaten	Sudah ada aplikasi e profil.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Garut adalah mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kesehatan, maka dapat diidentifikasi bahwa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Lokasi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta	PPK Perkotaan	Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur rujukan berjenjang	Belum terbentuknya regulasi penataan Kawasan khusus fasilitas Kesehatan
2.	Peningkatan Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) menjadi Rumah Sakit tipe C	1. Perkotaan Garut 2. Perkotaan Pameungpeuk 3. Perkotaan Cikajang 4. Perkotaan Rancabuaya	Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur rujukan berjenjang	Kapasitas SDM dalam memahami RTRW sehingga pembangunan tidak dilaksanakan di lokasi yang sudah direncanakan
3.	Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Pelayanan Kesehatan Paru	1. PKL Perkotaan Garut 2. PKL Perkotaan Cikajang	Adanya dukungan kepala daerah untuk penyediaan fasilitas Kesehatan jiwa	Kapasitas SDM dalam memahami RTRW sehingga pembangunan tidak dilaksanakan di lokasi yang sudah direncanakan

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mengurangi pencemaran terkait pengelolaan instalasi pengolahan air limbah di Puskesmas	Adanya dukungan anggaran dari APBD dan APBN (DAK)	Lahan Puskesmas yang sempit
2.	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	Adanya kegiatan pengawasan Kesehatan lingkungan	Belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah
3.	Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO	Adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok	Belum diterapkannya denda dari perda tentang Kawasan Tanpa Rokok sehingga banyak pelanggaran terjadi.

### 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Garut;

2. Prevalensi Stunting di Kabupaten Garut yang masih tinggi;
3. Masih rendahnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil;
4. Masih tingginya intensitas kesakitan (insidens dan prevelansi) penyakit menular dan tidak menular yang berisiko menimbulkan kematian;
5. Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan;
6. Masih adanya Fasilitas Kesehatan yang belum sesuai standar;
7. Penegakan peraturan dan kesadaran masyarakat untuk tidak merokok dalam ruangan masih rendah;
8. Akses terhadap sanitasi dasar masih kurang;
9. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten Garut;
10. Penyediaan Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin belum memadai.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Garut yaitu "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kabupaten Garut termasuk dalam Misi ke-1 yakni mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan sasaran ke-2 yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yaitu *"Meningkatnya harapan hidup masyarakat"*. Visi dan misi Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Garut dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Sebelum Perubahan</b>											
1	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat		Angka Harapan Hidup	71,36	71,41	71,69	72,02	72,34	72,67	73	73
2		Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	97,01%	97,01%	97,01%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi	Persentase Pencapaian Pelayanan Asuhan Berkesinambungan	79,7%	72,46%	72,46%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pencapaian Indeks Keluarga Sehat	7,44%	7,90%	7,90%	50%	55%	60%	65%	65%
5		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase capaian Pencegahan dan Pengendalian	87,91%	75,75%	75,75%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
			an Penyakit								
<b>Setelah Perubahan</b>											
1	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat		Angka Harapan Hidup	71,36	71,41	71,42-71,48	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,03 - 72,16
2		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,074	0,079	0,08	0,08	0,1	0,15	0,2	0,2
3		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A
4			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

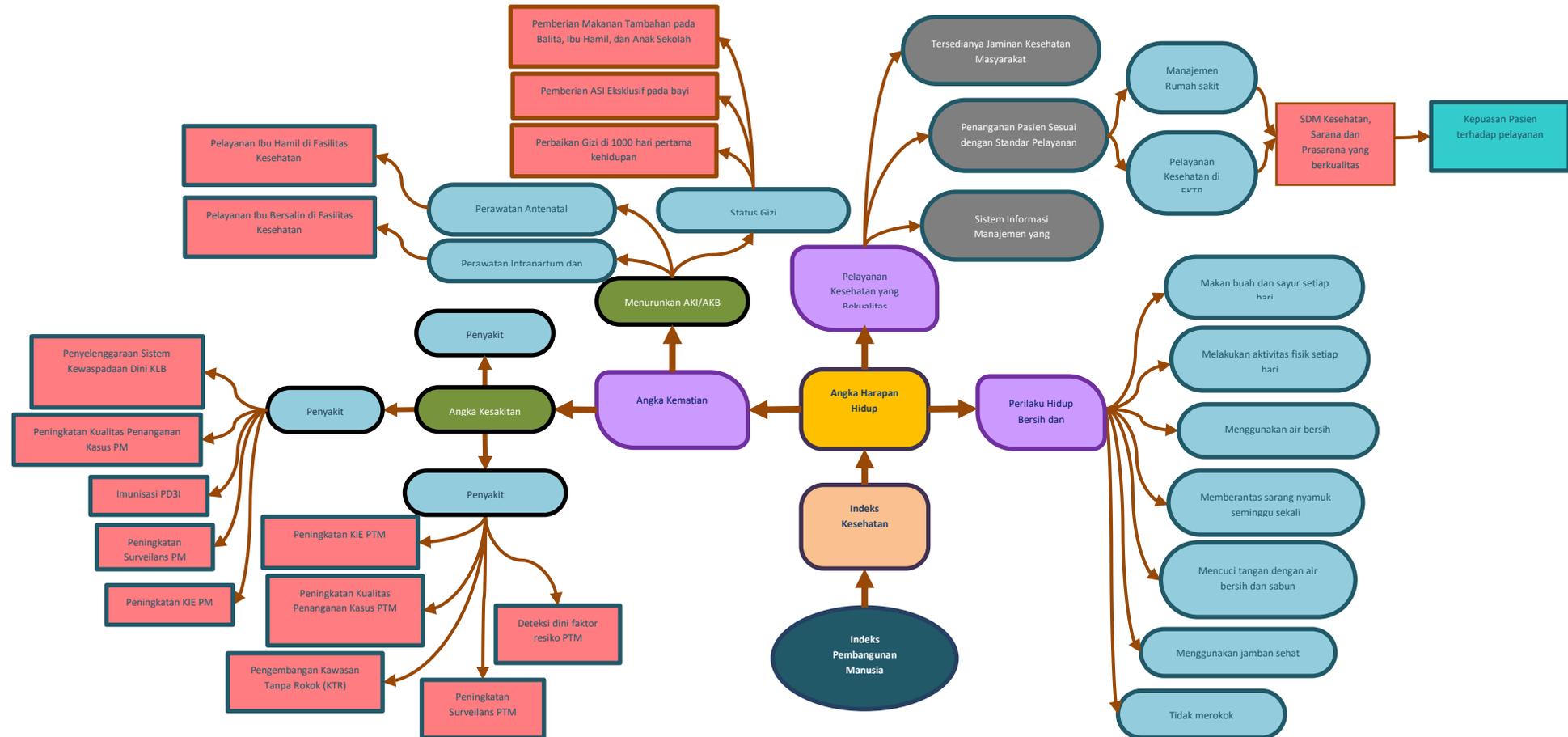
Kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai peningkatan Harapan Hidup dapat dijabarkan melalui *Logical framework* atau kerangka berpikir logis pada Gambar 4.1 yang menggambarkan berbagai upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut yang diukur dengan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup merupakan komponen perhitungan dari Indeks Kesehatan yang merupakan salah satu komponen yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang dapat dihitung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Seperti yang dapat dipahami, bahwa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidaklah bisa dengan mudah diuraikan melalui beberapa poin saja, karena merupakan hal yang kompleks dan terintegrasi antara suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Secara umum, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai peningkatan harapan hidup masyarakat dapat diuraikan melalui tiga hal, yaitu menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pertama, angka Kematian dapat diturunkan dengan menurunkan Angka Kesakitan dengan mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta menurunkan angka kesakitan karena penyakit lainnya dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan. Selain itu juga dengan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka

Kematian Bayi dengan berbagai upaya, yaitu meningkatkan status gizi, meningkatkan kualitas pelayanan antenatal, dan meningkatkan kualitas pelayanan intrapartum dan postnatal. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, hal tersebut dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, mengoptimalkan pelayanan pasien sesuai dengan standar pelayanan dengan memperhatikan manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan di FKTP, serta meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen. Ketiga, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui aktivitas makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, memberantas sarang nyamuk seminggu sekali, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat dan tidak merokok di dalam rumah.

Dinas Kesehatan dalam upaya untuk mencapai kinerjanya tidaklah sendiri dan memerlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang lainnya. *Crosscutting* kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pada Gambar 4.2 dapat digunakan dalam mengidentifikasi berbagai dukungan aspek untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Kesehatan. Selain itu, dapat mempermudah identifikasi Perangkat Daerah yang memiliki *crosscutting* kinerja dengan Dinas Kesehatan berdasarkan urusan yang diampu dan masih memiliki keterkaitan kinerja untuk mencapai harapan hidup masyarakat. Melalui gambar tersebut dapat diidentifikasi bahwa Dinas Kesehatan memiliki *crosscutting* dengan berbagai Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pendidikan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Daya Saing Infrastruktur, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Daya Beli.

**Gambar 4. 1 Logical Framework Dinas Kesehatan Kabupaten Garut**



**Gambar 4. 2 Crosscutting Kinerja Dinas Kesehatan**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan perubahan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

<b>VISI:</b> Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera			
<b>MISI I:</b> Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Mewujudkan Rumah Sakit PONEK dan Puskesmas PONED</li> <li>3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan dengan Pembangunan Pustu</li> <li>4. Meningkatkan Kompetensi SDM Kesehatan</li> <li>5. Melakukan <i>Updating</i> Data Kebutuhan Riil Anjab dan ABK</li> <li>6. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk Pembangunan Poskesdes</li> <li>7. Kolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk Mengoptimalkan Penggunaan ADD dalam Pembiayaan Tenaga Kesehatan Melalui Pembinaan oleh Puskesmas</li> <li>8. Mengoptimalkan Upaya Menuju <i>Zero Stunting</i> Melalui Intervensi Spesifik dan Sensitif</li> <li>9. Mengoptimalkan Upaya Pencegahan dan Perlindungan terhadap Penyakit Tidak Menular Melalui Deteksi Dini dan Surveilans</li> <li>10. Peningkatan Intervensi Spesifik Pencegahan Penyakit Menular</li> <li>11. Memperkuat Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta</li> <li>12. Mengoptimalkan Promosi Kesehatan dan Imunisasi</li> <li>13. Penanganan Kasus yang Berpotensi Kejadian Luar Biasa/Wabah Kurang dari 24 Jam</li> <li>14. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Kawasan Tanpa Rokok</li> <li>15. Mengoptimalkan Kolaborasi untuk Menjamin Kualitas Air Bersih dan Sanitasi Dasar</li> <li>16. Mendorong <i>Open Defecation Free</i></li> <li>17. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan</li> <li>18. Mendorong Tercapainya <i>Universal Health Coverage</i> di Kabupaten Garut</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>Sebelum Perubahan</b>																							
Meningkatkannya umur harapan hidup masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan																						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Rekomendasi Peijinan Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	jumlah Pasyankes Tujuan yang diberi rekomendasi izin	100	100	200	100	200	100	220	100	242	100	266,2	100	292,82	100	1,221		
						Peningkatan Pengelolaan SIJERUK (Sistem Informasi Jejring Rujukan Kegawat dan darurat)	jumlah masyarakat yang terlayani	100	100	500	100	2000	100	2200	100	2420	100	2662	100	2928,2	100	12,210		
						<b>Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin</b>	<b>prosentase orang miskin yang mendapatkan kartu BPJS/KIS</b>	20%	20%	30.200	20%	30.500	20%	33.550	20%	4,235	20%	4,659	20%	5,124	100%	78,068		
						Bantuan biaya kesehatan keluarga miskin/Kejadian Luar Biasa/korban Bencana/korban KDRT/korban tindakan terorismi	Klaim Pembayaran pelayanan kesehatan	100%	100%	200	100%	500	100%	550	100%	605	100%	665,5	100%	732,05	100%	3,053		
						Bantuan biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (PBI)	Pembayaran premi keBPJS	100%	100%	30.000	100%	30000	100%	33,000	100%	3,630	100%	3,993	100%	4,392	100%	75,015		
						<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana fasilitas kesehatan</b>	<b>Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk</b>	1/10.860	1/38.000	191.887	1/37.000	36.667	1/36.000	26.636	1/35.000	25,800	1/34.000	29.179	1/33.000	1/33.000	118,282			
						Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Lokasi tanah	-	1	100	2	4,000	1	5,000	1	2,000	1	3,000	1	3,000	1	17,000		
						Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya.	jumlah labkesda, puskesmas dan jaringannya yang	24	37	184.587	9	26,558	8	14,916	8	16,408	8	18,048	8	19,853	8	95,783		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				dibangun/rehabilitasi																	
				Pengadaan prasarana dan peralatan kesehatan Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Puskesmas yang di renovasi	60	60	7200	70	6109	80	6720	90	7391	95	8131	100	8944	100	37296	
				Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas (DAK Fisik)				2	3533	7	4274	9	4701757	11	5171933				9881498		
				Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Fisik)					9685		10652		11718254		112890079				24628672		
				<b>Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Labkesda, rumah sakit, rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	<b>1/435.000</b>	<b>1/435.000</b>	<b>9.631</b>	<b>1/416.666</b>	<b>77.117</b>	<b>1/416.666</b>	<b>80.229</b>	<b>1/416.666</b>	<b>88.052</b>	<b>1/416.666</b>	<b>94.657</b>	<b>1/416.666</b>	<b>106.123</b>	<b>1/416.666</b>	<b>446.178</b>	
				Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Lokasi Tanah		1	2.000	2	6.000	1	2.000	1	2.000	-	-	1	2.000	1	12.000	
				Pembangunan/rehabilitasi Labkesda dan Rumah Sakit	Jumlah Rs Baru yang beroperasi		1	6.228	3	33.257	3	36.583	3	40.241	3	44.265	3	48.692	3	203.038	
				Pengadaan prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit, Labkesda dan fasyankes rujukan lainnya	Presentase prasarana dan peralatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan		50	1.403	100	19.000	100	20.900	100	22.990	100	25.289	100	27.818	100	115.997	
				Operasional Rumah Sakit	Presentase sarana yang telah tersedia				30	375	20	413	20	454	20	500	10	550		<b>2.294</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
			Malangbong (DBHCHT)																															
			Operasional Klinik Jiwa (DBHCHT)	Prosentase Sarana yang tersedia					1.200,00		1.320,00		1.452,00		1.597,20		1.756,92		7,326															
			Pembangunan Regional Maintenance Cerver (DAK Fisik)	Jumlah Gedung Yang dibangun				1	450,00		1	495,00		1	598,95		1	658,45		2,747														
			Rehabilitasi LABKESDA (DAK Fisik)	Jumlah Gedung Yang dibangun				1	1.350,00		1	1.485,00		1	1.796,85		1	1.976,54		8,242														
			Pengadaan Alkes Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Fisik)						1.250,00			1.375,00			1.512,50			1.663,75			1.830,13		7,631											
			Penyediaan Prasarana Limbah LABKESDA (DAK Fisik)	Jumlah alat yang tersedia				1	234,50		1	257,95		1	283,75		1	312,12		1	343,33		1,432											
			Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional (Pembangunan Rumah Sakit Type D Kecamatan Limbangan) (Blok Cibalandongan, Kel.LIMBANGA NTIMUR, Kec.BLUBUR LIMBANGAN, Kab. Garut) (Banprov)	Jumlah Gedung Rumah sakit Yang dibangun				1	14.000,00		1	15.400,00		1	16.940,00		1	18.634,00		1	20.497,40		85,471											
			<b>Program Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan</b>					50%			60%		4.695		1	14.000,00		1	15.400,00		1	16.940,00		1	18.634,00		1	20.497,40		100%	85,471		
			AKREDITASI PUSKESMAS (DAK Non Fisik)	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi					3.680,68		100%	4.048,75		100%	4.453,62		100%	4.898,99		100%	5.388,88													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Pengelolaan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas Berprestasi	persentase hasil ikm di puskesmas dan Puskesmas yang berprestasi	70%	80%	100	100%	400	100%	440	100%	484	100%	532	100%	586	100%	2,442			
						Pengelolaan Akreditasi Puskesmas dan Fasyankes Primer lainnya	Persentase Puskesmas realkreditasi Paripurna (Puskesmas)	1.5%	1.5%	4,230	5%	3,950	5%	4,345	5%	4,780	5%	5,257	5%	5,783	5%	24,115			
						Pengelolaan Akreditasi RS, Labkesda dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Lainnya	RS dan Labkesda terakreditasi	-	1	365	1	50					1	500					550		
						<b>Program Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Prosentase kesehatan tenaga berizin praktek di puskesmas dan rumah sakit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	560	<b>100%</b>	2196	<b>100%</b>	<b>2415,6</b>	<b>100%</b>	<b>2657,16</b>	<b>100%</b>	<b>2923,076</b>	<b>100%</b>	2635	<b>100%</b>	<b>12,827</b>			
						Fasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas	jumlah pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas	60	60	100	60	1,500	60	1,650	60	1,815	60	1,997	60	2,196	60	9,158			
						Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kualitas dan kompetensinya	700	700	100	700	300	700	330	700	363	700	399	700	439	700	1,831			
						Insentif tenaga kesehatan (Seluruh kecamatan terpencil di Kabupaten Garut) (Dimas Kesehatan Kabupaten Garut, Kab. Garut) (Banprov)	Prosentase tenaga yang diberi insentif			360,00	100%	396,00	100%	435,60	100%	479,16	100%	527,08				1,838			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				9.832		20.719		52.791		25,070		30.577		30,335		159,492		
				prosentase ketersediaan Puskesmas dengan obat dan vaksin esensial	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%	
				Prosentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%	
				Prosentase Sarana Kefarmasian Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	65%	65%		65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2paket	2paket	8,444	2paket	15,000	2paket	16,500	2paket	18,150	2paket	19,965	2paket	21,962	2paket	91,577		
			Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Nilai indikator Pengelolaan Instalasi Farmasi Kabupaten	75	75	1,000	75	425	75	467,5	75	514,25	75	565,675	75	622,242 <sub>5</sub>	75	2,595		
			Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi kabupaten	Jumlah paket sarana prasarana instalasi	1paket	1paket	-	1paket	4,394	1paket	4,833	1paket	5,317	1paket	5,848	1paket	6,433	1paket	26,825		
			Pembangunan/Rehabilitasi Gudang Instalasi Farmasi Kabupaten	Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan		1paket	1,136			1	30000			1	3000				33,000		
			Pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan PKRT	Jumlah alkes dan PKRT yang diperiksa	30	30	100	30	100	30	110	30	121	30	133	30	146	30	610		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian	Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar	75	75	150	75	500	75	550	75	605	75	666	75	732	75	3,053		
						Peningkatan penggunaan obat rasional	Capaian penggunaan obat rasional	60%	60%	138	60%	300	60%	330	60%	363	60%	399	60%	439	60%	1,831		
						<b>Program Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>122,097</b>	<b>100%</b>	<b>97.218,93</b>	<b>100%</b>	<b>147.024,21</b>	<b>100%</b>	<b>699.998,92</b>	<b>100%</b>	<b>5.552.668.741,37</b>	<b>100%</b>	<b>139.655,67</b>	<b>100%</b>	<b>5.553.752.639</b>		
						Peningkatan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)						250,00		275,00		302,50		332,75		366,03	<b>100%</b>	<b>1,526</b>		
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Tarogong	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	4.247,32	100%	4.672,06	100%	513,926,16	100%	5.653,19	100%	6.218,51	<b>100%</b>	<b>534,717</b>			
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Leles	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.678,73	100%	1.846,61	100%	2.031,27	100%	2.234,39	100%	2.457,83	<b>100%</b>	<b>10,249</b>			
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Kadungora	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	2.150,57	100%	2.365,63	100%	2.602,19	100%	2.862,41	100%	3.148,65	<b>100%</b>	<b>13,129</b>			
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Limbangan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	4.318,12	100%	4.749,93	100%	5.224,92	100%	5.747,41	100%	632,22	<b>100%</b>	<b>20,673</b>			
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Selaawi	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.866,10	100%	2.052,71	100%	2.257,98	100%	2.483,78	100%	2.732,15	<b>100%</b>	<b>11,393</b>			
						Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukamerang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.880,26	100%	2.068,29	100%	227,51	100%	250,26	100%	2.752,89	<b>100%</b>	<b>7,179</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pembangunan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.579,09	100%	1.737,00	100%	1.910,70	100%	2.101,76	100%	2.311,94	100%	9,640		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pasundan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.628,83	100%	1.791,71	100%	1.970,88	100%	2.167,97	100%	2.384,77	100%	9,944		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cipanas	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	628,19	100%	691,00	100%	760,10	100%	836,11	100%	919,73	100%	3,835		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Samarang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.107,20	100%	1.217,93	100%	1.339,72	100%	1.473,69	100%	1.621,06	100%	6,760		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Bayongbong	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	3.006,44	100%	3.307,08	100%	36.377,93	100%	4.001,57	100%	4.401,73	100%	51,095		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cilawu	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	228,20	100%	2.510,22	100%	2.761,25	100%	3.037,37	100%	3.341,11	100%	11,878		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cisarupan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	2.439,63	100%	2.683,59	100%	2.951,95	100%	3.247,14	100%	3.571,86	100%	14,894		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cikajang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	2.847,36	100%	3.132,10	100%	3.445,31	100%	3.789,84	100%	4.168,82	100%	17,383		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Peundeuy	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.347,89	100%	1.482,68	100%	1.630,94	100%	1.794,04	100%	1.973,44	100%	8,229		
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sindangratu	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	2.028,73	100%	2.231,61	100%	2.454,77	100%	2.700,24	100%	2.970,27	100%	12,386		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Bungbulang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	2.119,39	100%	2.331,33	100%	2.564,46	100%	2.820,91	100%	3.103,00	100%	12,939			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cisewu	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.234,58	100%	1.358,04	100%	1.493,84	100%	1.643,23	100%	1.807,55	100%	7,537			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pameungpeuk	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.884,20	100%	2.072,62	100%	2.279,89	100%	2.507,87	100%	2.758,66	100%	11,503			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cikelet	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.883,33	100%	2.071,67	100%	2.278,83	100%	2.506,72	100%	2.757,39	100%	11,498			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Labkesda	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	170,53	100%	187,58	100%	206,34	100%	226,97	100%	249,67	100%	1,041			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Singajaya	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	2.044,15	100%	2.248,56	100%	2.473,42	100%	2.720,76	100%	2.992,84	100%	12,480			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cihurip	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	884,62	100%	973,08	100%	1.070,39	100%	1.177,43	100%	1.295,17	100%	5,401			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukamukti	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	387,15	100%	425,87	100%	468,45	100%	515,30	100%	566,83	100%	2,364			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cisandaan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	305,68	100%	336,25	100%	369,88	100%	406,86	100%	447,55	100%	1,866			
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cimari	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	261,96	100%	288,16	100%	316,97	100%	348,67	100%	383,54	100%	1,599			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Maroko	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	467,17	100%	513,89	100%	565,28	100%	621,81	100%	683,99	100%	2,852		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pamulihan	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	482,37	100%	530,61	100%	583,67	100%	642,04	100%	706,24	100%	2,945		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukaraja	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	454,88	100%	500,37	100%	550,40	100%	605,44	100%	665,99	100%	2,777		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Karang Sari	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	558,15	100%	613,96	100%	675,36	100%	742,89	100%	817,18	100%	3,408		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Maripari	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	572,35	100%	629,58	100%	692,54	100%	761,79	100%	837,97	100%	3,494		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Karangtengah	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	551,23	100%	606,35	100%	666,99	100%	733,69	100%	807,06	100%	3,365		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Kersamenak	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	551,23	100%	606,35	100%	666,99	100%	733,69	100%	807,06	100%	3,365		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Mekarwangi	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	663,60	100%	729,96	100%	802,96	100%	883,25	100%	971,58	100%	4,051		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pakuwon	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	603,91	100%	6.643,00	100%	730,73	100%	803,80	100%	884,18	100%	9,666		
					Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP					100%	740,44	100%	814,49	100%	895,94	100%	985,53	100%	1.084,08	100%	4,520		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			UPT Puskesmas Mekarmukti																			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukarame	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.084,91	100%	1.193,40	100%	1.312,74	100%	1.444,01	100%	1.588,41	100%	6,623			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Garawangsa	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.021,49	100%	1.123,64	100%	1.236,01	100%	1.359,61	100%	1.495,57	100%	6,236			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Gadog	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	718,25	100%	790,08	100%	869,09	100%	955,99	100%	1.051,59	100%	4,385			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukawening	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.114,67	100%	1.226,13	100%	1.348,75	100%	1.483,62	100%	1.631,98	100%	6,805			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cibiuk	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.018,09	100%	1.119,90	100%	1.231,89	100%	1.355,08	100%	1.490,59	100%	6,216			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Lembang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	664,86	100%	731,35	100%	804,48	100%	884,93	100%	973,42	100%	4,059			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Tegalgede	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	850,70	100%	935,77	100%	1.029,34	100%	1.132,28	100%	1.245,50	100%	5,194			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Talegong	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	905,17	100%	995,69	100%	1.095,26	100%	1.204,78	100%	1.325,26	100%	5,526			
			Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cibalong	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP				100%	1.335,64	100%	1.469,21	100%	1.616,13	100%	1.777,74	100%	1.955,52	100%	8,154			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Padaawas	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	997,56	100%	1.097,3 <sub>2</sub>	100%	1.207,0 <sub>5</sub>	100%	13.277,5 <sub>6</sub>	100%	1.460,5 <sub>3</sub>	100%	18,040		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Leuwigoong	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.246,0 <sub>3</sub>	100%	1.370,6 <sub>4</sub>	100%	1.507,7 <sub>0</sub>	100%	16.584,7 <sub>0</sub>	100%	1.824,3 <sub>2</sub>	100%	22,533		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukakarya	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	808,05	100%	888,85	100%	977,74	100%	1.075,51	100%	1.183,0 <sub>6</sub>	100%	4,933		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukamulya	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.058,5 <sub>4</sub>	100%	1.164,4 <sub>0</sub>	100%	1.280,8 <sub>4</sub>	100%	1.408,92	100%	1.549,8 <sub>1</sub>	100%	6,463		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cimaragas	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.398,1 <sub>9</sub>	100%	1.538,0 <sub>1</sub>	100%	1.691,8 <sub>2</sub>	100%	1.861,00	100%	2.047,1 <sub>0</sub>	100%	8,536		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukahurip	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.427,3 <sub>3</sub>	100%	1.570,0 <sub>7</sub>	100%	1.727,0 <sub>7</sub>	100%	1.899,78	100%	2.089,7 <sub>6</sub>	100%	8,714		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Bojongloa	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.219,1 <sub>5</sub>	100%	1.341,0 <sub>6</sub>	100%	1.475,1 <sub>7</sub>	100%	1.622,68	100%	1.784,9 <sub>5</sub>	100%	7,443		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cilimus	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.512,8 <sub>1</sub>	100%	1.664,0 <sub>9</sub>	100%	1.830,5 <sub>0</sub>	100%	2.013,55	100%	2.214,9 <sub>0</sub>	100%	9,236		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cempaka	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.712,9 <sub>9</sub>	100%	1.884,2 <sub>9</sub>	100%	2.072,7 <sub>1</sub>	100%	2.279,99	100%	2.507,9 <sub>8</sub>	100%	10,458		
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Rancasalak	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	998,10	100%	1.097,9 <sub>1</sub>	100%	1.207,7 <sub>0</sub>	100%	1.328,47	100%	1.461,3 <sub>1</sub>	100%	6,093		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Cisompet	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.949,27	100%	2.144,20	100%	2.358,62	100%	2.594,48	100%	2.853,93	100%	11,901			
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Banjarwangi	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	3.709,74	100%	4.080,72	100%	44.887,88	100%	4.937,67	100%	5.431,43	100%	63,047			
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Karangmulya	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	939,39	100%	1.033,32	100%	1.136,66	100%	1.250,32	100%	1.375,35	100%	5,735			
				Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Sukasenang	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP			100%	1.222,67	100%	1.344,94	100%	1.479,43	100%	1.627,37	100%	1.790,11	100%	7,465			
				Kegiatan Dukungan Peningkatan BLUD di PKM	Prosentase Laporan BLUD Puskesmas sesuai SAP	100%	100%	122,097	100%	122	100%	134	100%	148	100%	162	100%	179	100%	745		
				<b>Program standarisasi Pelayanan kesehatan</b>	<b>Hasil Penilaian IKM dan Dokumen SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	121	<b>B</b>	350	<b>B</b>	385	<b>B</b>	423,5	<b>B</b>	<b>465,85</b>	<b>B</b>	512.435	<b>B</b>	<b>2,137</b>		
				Monitoring dan Evaluasi	nilai ikm , Dokumen Perencanaan (Baik)	B	B	121	B	150	B	165	B	181,5	B	199,65	B	219.615	B	916		
				Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Paket Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	0	0	0	1paket	200	1paket	220	1paket	242	1paket	266	1paket	293	1paket	1,221		
				<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>49.892</b>	<b>100%</b>	<b>61.765</b>	<b>100%</b>	<b>67.941</b>	<b>100%</b>	<b>74,735</b>	<b>100%</b>	<b>82.209</b>	<b>100%</b>	<b>9.035,996.572</b>	<b>100%</b>	<b>9.036.283.222</b>		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siliwangi (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas			100%	677,06	100%	744,77	100%	819,25	100%	901,17	100%	9.912,89	100%	13,055			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Guntur (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	574,28	100%	631,71	100%	694,88	100%	764,36	100%	840,80	100%	3,506		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasundan (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	663,04	100%	729,34	100%	802,28	100%	882,50	100%	970,75	100%	4,048		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangpawitan (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	835,76	100%	919,34	100%	1.011,27	100%	1.112,40	100%	1.223,64	100%	5,102		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangmulya (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	612,74	100%	674,01	100%	741,41	100%	815,55	100%	897,11	100%	3,741		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cempaka (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	571,54	100%	628,69	100%	691,56	100%	760,72	100%	836,79	100%	3,489		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wanaraja (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	736,55	100%	810,21	100%	891,23	100%	980,35	100%	1.078,39	100%	4,497		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cimaragas (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	707,02	100%	777,72	100%	855,50	100%	941,05	100%	1.035,15	100%	4,316		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Garawangsa (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	646,88	100%	711,57	100%	782,73	100%	861,00	100%	947,10	100%	3,949		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarogong DTP (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	629,66	100%	692,63	100%	761,89	100%	838,08	100%	921,89	100%	3,844		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cipanas (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	620,57	100%	682,63	100%	750,89	100%	825,98	100%	908,58	100%	3,789		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mekarwangi (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	563,22	100%	619,54	100%	681,50	100%	749,65	100%	824,61	100%	3,439		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Haurpanggung (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	662,75	100%	729,03	100%	801,93	100%	882,12	100%	970,33	100%	4,046		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kersamenak (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	499,18	100%	549,10	100%	604,01	100%	664,41	100%	730,85	100%	3,048		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pembangunan (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	632,71	100%	695,99	100%	765,58	100%	842,14	100%	926,36	100%	3,863		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukasenang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	623,24	100%	685,56	100%	754,11	100%	829,53	100%	912,48	100%	3,805		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bagendit (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	665,21	100%	731,73	100%	804,90	100%	885,39	100%	973,93	100%	4,061		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukaraja (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	521,89	100%	574,08	100%	631,49	100%	694,64	100%	764,10	100%	3,186			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Samarang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	648,98	100%	713,88	100%	785,26	100%	863,79	100%	950,17	100%	3,962			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukakarya(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	649,02	100%	713,92	100%	785,32	100%	863,85	100%	950,23	100%	3,962			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Padaawas (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	604,95	100%	665,44	100%	731,99	100%	805,19	100%	885,70	100%	3,693			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gadog (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	604,44	100%	664,88	100%	731,37	100%	804,50	100%	884,95	100%	3,690			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PuskesmasLeles DTP (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	721,51	100%	793,66	100%	873,03	100%	960,33	100%	1.056,36	100%	4,405			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	592,58	100%	651,84	100%	717,02	100%	788,72	100%	867,60	100%	3,618			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kadungora(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	654,24	100%	719,67	100%	791,63	100%	870,80	100%	957,88	100%	3,994			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rancasalak (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	627,95	100%	690,74	100%	759,82	100%	835,80	100%	919,38	100%	3,834			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Leuwigoong (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	552,35	100%	607,58	100%	668,34	100%	735,17	100%	808,69	100%	3,372			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cibatu (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	840,62	100%	924,68	100%	1.017,1 <sub>5</sub>	100%	1.118,87	100%	1.230,7 <sub>5</sub>	100%	5,132			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukamerang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	624,99	100%	687,49	100%	756,24	100%	831,87	100%	915,05	100%	3,816			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Malangbong (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	784,86	100%	863,34	100%	949,68	100%	1.044,64	100%	1.149,1 <sub>1</sub>	100%	4,792			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Citeras (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	751,36	100%	826,50	100%	909,15	100%	1.000,06	100%	1.100,0 <sub>7</sub>	100%	4,587			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukawening (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas				100%	613,45	100%	674,79	100%	742,27	100%	816,50	100%	898,15	100%	3,745			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukamukti(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	453,72	100%	499,09	100%	549,00	100%	603,90	100%	664,29	100%	2,770		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maripari (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	583,42	100%	641,77	100%	705,94	100%	776,54	100%	854,19	100%	3,562		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangtengah (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	524,06	100%	576,46	100%	634,11	100%	697,52	100%	767,27	100%	3,199		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bayongbong (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	820,48	100%	902,53	100%	992,79	100%	1.092,06	100%	1.201,27	100%	5,009		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cilimus (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	617,16	100%	678,88	100%	746,77	100%	821,45	100%	9.035,898.124,00	100%	9.035.900.988		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukahurip (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	628,16	100%	690,98	100%	760,08	100%	836,08	100%	919,69	100%	3,835		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cilawu DTP (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	878,78	100%	966,66	100%	1.063,33	100%	1.169,66	100%	1.286,63	100%	5,365		
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bojongloa (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	671,90	100%	739,09	100%	812,99	100%	894,29	100%	983,72	100%	4,102		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisurupan (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	817,01	100%	898,71	100%	988,59	100%	1.087,44	100%	1.196,19	100%	4,988		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pakuwon (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	571,95	100%	629,15	100%	692,06	100%	761,27	100%	837,40	100%	3,492		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukamulya(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	661,91	100%	728,10	100%	800,91	100%	881,01	100%	969,11	100%	4,041		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cikajang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	853,52	100%	938,87	100%	1.032,75	100%	1.136,03	100%	1.249,63	100%	5,211		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Singajaya (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	752,37	100%	827,61	100%	910,37	100%	1.001,40	100%	1.101,54	100%	4,593		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cihurip (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	559,35	100%	615,29	100%	676,82	100%	744,50	100%	818,95	100%	3,415		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banjarwangi (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	788,19	100%	867,00	100%	953,71	100%	1.049,08	100%	1.153,98	100%	4,812		
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Peundeuy (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas					100%	634,13	100%	697,54	100%	767,30	100%	844,03	100%	928,43	100%	3,871		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pameungpeuk DTP (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	918,51	100%	1.010,36	100%	1.111,40	100%	1.222,54	100%	1.344,79	100%	5,608		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisompet (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	788,84	100%	867,72	100%	954,49	100%	1.049,94	100%	1.154,93	100%	4,816		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cikelet (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	753,71	100%	829,09	100%	911,99	100%	1.003,19	100%	1.103,51	100%	4,601		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cimari (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	781,69	100%	859,86	100%	945,84	100%	1.040,43	100%	1.144,47	100%	4,772		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cibalong (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	674,62	100%	742,08	100%	816,29	100%	897,92	100%	987,71	100%	4,119		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maroko (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	703,16	100%	773,47	100%	850,82	100%	935,90	100%	1.029,49	100%	4,293		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bungbulang (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	913,88	100%	1.005,26	100%	1.105,79	100%	1.216,37	100%	1.338,01	100%	5,579		
			Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mekarmukti (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM di Puskesmas				100%	644,56	100%	709,02	100%	779,92	100%	857,91	100%	943,70	100%	3,935		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sindangratu (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	888,77	100%	977,65	100%	1.075,4 <sub>1</sub>	100%	1.182,96	100%	1.301,2 <sub>5</sub>	100%	5,426			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisewu DTP (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	817,86	100%	899,64	100%	989,60	100%	1.088,57	100%	1.197,4 <sub>2</sub>	100%	4,993			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukarame (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	752,76	100%	828,04	100%	910,84	100%	1.001,93	100%	1.102,1 <sub>2</sub>	100%	4,596			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Talegong (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	723,61	100%	795,97	100%	875,57	100%	963,12	100%	1.059,4 <sub>3</sub>	100%	4,418			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamulihan(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	473,78	100%	521,16	100%	573,28	100%	630,60	100%	693,66	100%	2,892			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisandaan(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	408,27	100%	449,10	100%	494,01	100%	543,41	100%	597,75	100%	2,493			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bl. Limbangan(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	960,55	100%	1.056,6 <sub>0</sub>	100%	1.162,2 <sub>6</sub>	100%	1.278,49	100%	1.406,3 <sub>4</sub>	100%	5,864			
					Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Selaawi (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	696,95	100%	766,64	100%	843,31	100%	927,64	100%	1.020,4 <sub>0</sub>	100%	4,255			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cibiuk (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	558,19	100%	614,01	100%	675,41	100%	742,95	100%	817,24	100%	3,408			
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tegalgede(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	664,35	100%	730,79	100%	803,87	100%	884,25	100%	972,68	100%	4,056			
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangasari(DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM diPuskesmas			100%	525,20	100%	577,72	100%	635,49	100%	699,04	100%	768,95	100%	3,206			
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM			100%	750,00	100%	825,00	100%	907,50	100%	998,25	100%	1.098,08	100%	4,579			
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM			100%	3.443,48	100%	3.787,83	100%	4.166,61	100%	4.583,27	100%	5.041,60	100%	21,023			
				Dukungan Manajemen BOK danJampersal (DAK Non Fisik)	Pencapaian SPM			100%	181,22	100%	199,34	100%	219,27	100%	241,20	100%	265,32	100%	1,106			
				Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan (Insentif Covid-19 Bagi TenagaKesehatan ) (DAK Non Fisik)	Prosentase tenaga yang diberi insentif			100%	12.210,00	100%	13.431,00	100%	14.774,10	100%	16.251,51	100%	17.876,66	100%	74,543			
				<b>Program Pelayanan Kesehatan Keluarga</b>	<b>Rata -rata Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11.162</b>	<b>100%</b>	<b>22.800</b>	<b>100%</b>	<b>25.080</b>	<b>100%</b>	<b>27,588</b>	<b>100%</b>	<b>30.347</b>	<b>100%</b>	<b>33,381</b>	<b>100%</b>	<b>139,196</b>		
	<b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan</b>			ASIH (ANAK SEHAT IBU SEHAT)	persentase ibu hamil diperiksa kehamilannya	99,17%		100%	<b>1,000</b>	100%	<b>1,100</b>	100%	<b>1,210</b>	100%	<b>1,331</b>	100%	<b>1,464</b>	100%	<b>6,105</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Keluarga dan Gizi				Peningkatan pelayanan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	persentase ibu bersalin ditolong persalinannya oleh nakes di fasilitas kesehatan	76,14%	100	100	100%	300	100%	330	100%	363	100%	399	100%	439	100%	1,831		
				Jaminan pertolongan persalinan (Jampersal)	persentase ibu bersalin ditolong persalinannya oleh nakes di fasilitas kesehatan	76,14%	100	10.912	100%	21,000	100%	23,100	100%	25,410	100%	27,951	100%	30,746	100%	128,207		
				Pelayanan Kesehatan dalam rangka Gerakan Membebaskan Garut dari Anemia (Gebetan)	Jumlah Anemia pada remaja putri menurun	51,86%	100	150	100%	200	100%	220	100%	242	100%	266	100%	293	100%	1,221		
				Peningkatan pelayanan kesehatan pada lansia	puskesmas yang dibina, persentase usia lanjut yang diperiksa, perayaan peringatan hari usia lanjut	99,17%	100	-	100%	300	100%	330	100%	363	100%	399	100%	439	100%	1,831		
				<b>Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	Prosentase Penanganan Kurang Gizi pada Balita dan Ibu Hamil	100%	100%	4,253	100%	1,500	100%	1,650	100%	1,815	100%	1,997	100%	2,196	100%	9,158		
				Pencanangan "Ga-Gah ti Garut" (Gerakan Cegah Stunting di Garut)	Jumlah pembentukan pos gizi	17	19	4,153	2	1,000	2	1,100	2	1,210	2	1,331	2	1,464	29	6,105		
				Penanggulangan KEP, AGB, GAKI, KVA dan gangguan kekurangan gizi mikro lainnya	persentase 4 (empat) Masalah Gizi yang ditangani	100%	100%	100	100%	500	100%	550	100%	605	100%	666	100%	732	100%	3,053		
				Pencegahan dan Penanggulangan STUNTING (DAK Fisik -DAK PENUGASAN)	Pencapaian SPM				100%	2.600,03	100%	2.860,03	100%	3.146,03	100%	3.460,63	100%	3.806,70		15,873		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri</b>	1,31%	1,31%	300	3%	2,500	5%	2,750	10%	3,025	15%	3,328	20%	3,660	20%	15,263		
	<b>Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat kat bidang kesehatan</b>		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan UKBM	Desa / kelurahan siaga aktif meningkat satu tingkat strata diatasnya	0	0	200	13desa	500	22	550	44	605	66	666	88	732	88	3,053		
			Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Tatanan Rumahtangga yang ber PHBS	60%		100	65%	2,000	70%	2,200	75%	2,420	80%	2,662	85%	2,928	85%	12,210		
			<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Prosentase Desa yang menerapkan STBM</b>	302	100	450	100	3850	100	4235	100	4660	100	3262	100	3586,46	100	19,593		
			Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Prosentase yang menerapkan STBM	90	100	200	100	600	100	660	100	726	100	799	100	878	100	3,663		
			Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan	Persentase pencapaian Indeks Resiko sanitasi (IRS)	31	31	-	35	500	40	550	45	605	50	666	55	732	60	3,053		
			Kecamatan Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat	32	32	150	42	750	42	825	42	908	42	998	42	1,098	42	4,579		
			Penyehatan TTU/Industri/TPM	Jumlah TTU/TUI/TPM yang diawasi memenuhi syarat kesehatan	74,71	74,71	100	74,71	450	75	495	78,97	545	80,43	599	82,61	658.845	82,61	2,748		
			Pengawasan keamanan pangan	jumlah sarana pangan yang diawasi	74,29	74,29	-	74,29	150	75	165	79,05	182	79,42	200	80,15	219.615	80,15	917		
			Pengadaan Sanitarian Kit (DAK Fisik)	Jumlah alat yang tersedia				14	1.400,00	35	1.540,00	8	1.694,00						4,634		
			<b>Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan</b>	70	70	50	75	400	88	440	85	484	90	532	95	586	95	2,442		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						kerja dasar dan Olah Raga																			
						Kesehatan kerja dan olah raga	persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	50	50	-	55	60	65	70	75	75	75	0							
							persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	70	70	50	75	400	88	440	85	484	90	532	95	586	95	2,442			
						<b>Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit</b>	<b>persentase Desa UCI</b>		<b>95%</b>	<b>6.217</b>	<b>95%</b>	<b>3,275</b>	<b>95%</b>	<b>3,603</b>	<b>95%</b>	<b>3,963</b>	<b>95%</b>	<b>4,359</b>	<b>95%</b>	<b>4,795</b>	<b>95%</b>	<b>19,995</b>			
						Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	persentase anak dibawah dua tahun IDL	95%	95%	475	95%	475	95%	523	95%	575	95%	632	95%	695,4475	95%	2,900			
	<b>Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular tidak menular</b>					Penanggulangan Penyakit Hipertensi	Prevalensi tekanan darah tinggi	100%	100%	-	100%	200	100%	220	100%	242	100%	266	100%	292,82	100%	1,221			
						Surveilans faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular	Prosentase masyarakat yang dilayani pemeriksaan kesehatan penyakitHipertensi, diabetes melitus dan PTM lainnya	100%	100%	<b>4,502</b>	100%	200	100%	220	100%	242	100%	266	100%	292,82	100%	1,221			
							Penanggulangan Penyakit Gangguan Jiwa	Prevalensi ODGJ yang dilayani oleh puskesmas	100%	100%	100	100%	200	100%	220	100%	242	100%	266	100%	292,82	100%	1,221		
							Penanggulangan Gangguan Kesehatan Indera	persentase kasus Penyakit indra yang tertanggulangi	85%	85%	100	85%	300	85%	330	85%	363	85%	399	85%	439,23	85%	1,831		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Peningkatan penanggulangan TB	Prosentase terduga TB yang dilakukan tindakan sesuai standar serta pengobatan sesuai standar	100%	100%	100	100%	300	100%	330	100%	363	100%	399	100%	439,23	100%	1,831		
						Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan IMS	Prosentase kelompok resiko HIV/AIDS dan IMS mendapatkan pelayanan sesuai standar dan pengobatan sesuai standar	100%	100%	600	100%	300	100%	330	100%	363	100%	399	100%	439,23	100%	1,831		
						Penanggulangan Penyakit bersumber Binatang dan penyakit menular langsung; malaria/ DBD/ Filariasis/ Rabies dan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang aktif melakukan penanggulangan penyakit bersumber binatang dan penyakit menular aktif yang	100%	100%	140	100%	800	100%	880	100%	968	100%	1,065	100%	1,171	100%	4,884		
						Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah serta Kebencanaan	persentase kasus PD3I yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	100%	100%	100	100%	250	100%	275	100%	303	100%	333	100%	366.025	100%	1,527		
						Peningkatan Kegiatan Kesehatan Matra, haji dan umroh	persentase pelaksanaan SurveilansSISK OHATKES jemaah haji	100%	100%	100	100%	250	100%	275	100%	303	100%	333	100%	366.025	100%	1,527		
	Administ rasi Umum (ADUM)					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik			53		250		60800		68900		73605		81476		285,031		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung yang dibangun				1	200			1	2,000									
			Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	4	4	4	4	300	4	300	4	400	4	400	4	500	4	500			
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Presentase kendaraan yang bisa beroperasi dengan baik	100	100	53	100	50	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	80,526	100	280,831			
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	presentase peralatan gedung kantor yang berfungsi secara baik	100	100		100	250	100	300	100	350	100	400	100	450	100	1,500			
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparaturnya</b>		100	47		47		52		57		63	100	69		288			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan		130	32	130	32	130	35	130	39	130	43	130	47	130	196			
			Pendidikan dan pelatihan Formal	Presentase pegawai yang mengikuti pelatihan		100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	100	75			
			Rekrutmen tenaga non PNS BLUD	presentase kebutuhan pegawai BLUD yang direkrut		100		100	600	100		100		100		100		100	0			
			<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			2732		3668		3312		3641		3996,2		4397,82		19,015			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase kebutuhan Listrik dan air yang disediakan		100	106		250		117		129		141	100	155		792			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan STNKnya		25	45	26	300	28	50	29	54	30	60	32	66	34	530			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat dan bahan yang disediakan untuk kebersihan																			
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	prosentase Alat kerja yang bisa berfungsi dengna baik																			
					Penyediaan jasa Administrasi keuangan																				
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan sesuai dengan kebutuhan																			
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang disediakan																			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Instalasi listrik yang diperbaharui/diganti																			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan																			
					Penyediaan makanan dan minuman	Bahan makanan dan minuman yang disediakan																			
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase Peralatan dan perlengkapan Kantor sesuai dengan kebutuhan																			
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/ administrasi	SDMK yang mendapat honorarium		100	1,940		1,950		2,145		2,360		2,595	100	2,855	100	11,905			
					Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan		20	42	20	200	20	220	20	242	20	266,2	20	292,82	20	1,221			
					Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Satpam		6	148	6	165	6	165	6	182	6	200	6	220	6	932			
					<b>Program: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>		100	47		211,2		110,8525		121,43775		133,581525	100	147,7233075		725			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan ketentuan		100	10	100	50	100	11	100	12	100	13	100	15	100	101			
					Penyusunan dan Pelaporan Aset	Prosentase Dokumen Laporan Aset yang sesuai dengan ketentuan		100	10	100	50	100	11	100	12	100	13	100	15	100	101			
					Aplikasi SIPKP			100	27	100	60,5	100	33	100	36	100	40	100	44	100	214			
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), LKPJ dan LPPD				3	15,70	3	17,27	3	19,00	3	20,90	3	22,37		95			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	dokumen Renja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)				2	35,00	2	38,58	2	42,44	2	46,68	2	51,35		214			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Setelah Penyesuaian Program dan Kegiatan ke Permendagri 90 Tahun 2019																					
											505.978,66		503.165,76		546.189,88		593.151,78		2148486,08		
Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan berkualitas			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi							147.053,64		147.053,64		161.759,00		177.934,90		633.801,19		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten							920,88		920,88		1.012,97		1.114,27		3.969,01		
				Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	70				72	122.169,20	74	122.169,20	76	134.386,12	78	147.824,73	78	526.549,26			
				Persentase produk pangan yang diawasi memenuhi syarat	70				72	550,88	74	550,88	76	605,97	78	666,57	78	2.374,31			
				Persentase TPM yang diawasi memenuhi syarat	70				72	120,00	74	120,00	76	132,00	78	145,20	78	517,20			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang memenuhi persyaratan dalam proses perizinan					100	250,00	100	250,00	100	275,00	100	302,50	100	1.077,50			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan yang dikendalikan dan diawasi						200	100,00	200	100,00	200	110,00	200	121,00	200	431,00		
			<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah Tempat Pengolahan (TPM) : jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diawasi	sarana					14	20,00	14	20,00	14	22,00	14	24,20	14	86,20		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan sarana TPM dan DAM	sarana					14	20,00	14	20,00	14	22,00	14	24,20	14	86,20		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dalam perizinan	sarana					100	550,88	100	550,88	100	605,97	100	666,57	100	2.374,31			
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dalam perizinan	sarana					100	550,88	100	550,88	100	605,97	100	666,57	100	2.374,31			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMk puskesmas yang kompeten				100		100	24.213,56	100	24.213,56	100	26.634,91	100	29.298,40	100	104.360,43			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan (di puskesmas dan RS) yang memiliki ijin							24.071,37		24.071,37		26.478,50		29.126,35		103.747,59			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah dokumen Anjab ABK , Perbup Rekrutmen Pegawai BLUD						2	24.011,20		24.011,20	2	26.412,32		29.053,56		2	103.488,29		
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Monev SDMk							60,16		60,16		66,18		72,80			259,30		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nakes yang sesuai standar kompetensi					100	142,19	100	142,19	100	156,41		172,05		612,84			
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dan pelatihan ujikom						142,19	142,19		156,41		172,05		612,84				
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						121.919,20	121.919,20		134.111,12		147.522,23		525.471,76					
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	70			100	100	51.386,28	100	51.386,28	100	56.524,91	100,00	62.177,40	100	221.474,86				
					Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	95			95	95	14.367,61	95	14.367,61	95	15.804,37	95	17.384,81	95	61.924,39				
					Persentase kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional /KIS	72,88			100	100	56.165,31	100	56.165,31	100	61.781,85	100	67.960,03	100	242.072,51				
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan				60	63.455,88	70	63.455,88	80	69.801,46	90	76.781,61	100	273.494,83				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP																	
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah paket Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukung						2	14.770,70		2	14.770,70	2	16.247,77		2	17.872,54	8	63.661,70
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah paket fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun						1	700,00		1	700,00	1	770,00		1	847,00	4	3.017,00
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan						6	3.500,00		6	3.500,00	6	3.850,00		6	4.235,00	24	15.085,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1	302,80		1	302,80	1	333,08		1	366,38	4	1.305,06
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan						1	6.034,31		1	6.034,31	1	6.637,74		1	7.301,52	4	26.007,88
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan						1	18.521,91		1	18.521,91	1	20.374,10		1	22.411,51	4	79.829,43
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						1	5.131,46		1	5.131,46	1	5.644,60		1	6.209,06	4	22.116,58
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin						1	4.754,22		1	4.754,22	1	5.229,65		1	5.752,61	1	20.490,70

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket pendaan bahan habis pakai					1	9.613,39	1	9.613,39	1	10.574,72	1	11.632,20	1	41.433,69		
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah paket pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					1	127,10	1	127,10	1	139,81	1	153,79	1	547,80		
				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>							365,33		365,33		401,86		442,05		1.574,57		
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan intervensi PISPK					67	165,33	67	165,33	67	181,86	67	200,05	67	712,57		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Jasa Internet, Dokumenn Profil					12 / 1	200,00	12 / 1	200,00	12 / 1	220,00	12 / 1	242,00	12 / 1	862,00		
				<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							233,57	200	233,57	200	256,92	200	282,62	200	1.006,68		
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan perizinan fasyankes rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ditindaklanjuti (rekomendasi)					100	103,57	100	103,57	100	113,92	100	125,32	100	446,38		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			KESEHATAN MASYARAKAT																				
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)					95	1.145,00	95	1.145,00	95	1.259,50	95	2.519,00	95	6.068,50					
				Cakupan Pencapaian SPM Penyakit					100	61.219,91	100	61.219,91	100	1.259,50	100	2.519,00	100	126.218,33					
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								62.364,91	62.364,91		68.601,40		75.461,55		268.792,78					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	120,00	100	120,00	100	132,00	100	145,20	100	517,20				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	120,00	100	120,00	100	132,00	100	145,20	100	517,20				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase orang dengan gangguan jiwa berat melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	308,30	100	308,30	100	339,13	100	373,04	100	1.328,77				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	225,00	100	225,00	100	247,50	100	272,25	100	969,75		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	525,00	100	525,00	100	577,50	100	635,25	100	2.262,75		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	persentase permintaan layanan ambulance gratis yang dilayani				100		100	477,10	100	477,10	100	524,81	100	577,29	100	2.056,30		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan surveilans kesehatan sesuai standar						100	150,00	100	150,00	100	165,00	100	181,50	100	646,50		
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	persentase pelaksanaan Surveilans SISKOHATKES jemaah haji						100	150,00	100	150,00	100	165,00	100	181,50	100	646,50		
				persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan matra						100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												67	750,00	67	750,00	67	825,00	67	907,50	67	3.232,50			
												100	408,97	100	408,97	100	449,86	100	494,85	100	1.762,64			
												100	123,60		123,60	100	135,96	100	149,56	100	532,72			
													200,26		200,26		220,28		242,31		863,12			
												100	51.545,99	100	51.545,99	100	56.700,59	100	62.370,65	100	222.163,23			
												100	1.117,23	100	1.117,23	100	1.228,95	100	1.351,84	100	4.815,24			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												20	4.522,07	10	4.522,07	10	4.974,28	10	5.471,71	10	19.490,13			
												100	1.145,00	100	1.145,00	100	1.259,50	100	1.385,45	100	4.934,95			
												100	476,40	100	476,40	100	524,04	100	576,44	100	2.053,28			
	<b>Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Masyarakat</b>												28.881,94		26.069,04		28.675,94		31.543,54		115.170,47			
													27.961,94		25.149,04		27.663,94		30.430,34		111.205,27			
												100	26.783,52	100	26.783,52	100	29.461,87	100	32.408,05	100	115.436,95			
												100	1.178,42	100	1.178,42	100	1.296,27	100	1.425,89	100	5.079,01			
													27.961,94	1.080	25.149,04	1.025	27.663,94	1.125	30.430,34		111.205,27			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	500,00	100	500,00	100	550,00	100	605,00	100	2.155,00		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	15.916,17	100	15.916,17	100	17.507,79	100	19.258,57	100	68.598,70		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	837,31	100	837,31	100	921,05	100	1.013,15	100	3.608,82		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	3.520,00	100	3.520,00	100	3.872,00	100	4.259,20	100	15.171,20		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	2.842,90	100	30,00	100	33,00	100	36,30	100	2.942,20		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	100,00	100	100,00	100	110,00	100	121,00	100	431,00		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100		100	70,00	100	70,00	100	77,00	100	84,70	100	301,70		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase bayi usia kurang dari 6 bulan						74.5	1.999,30	75	1.999,30	75.5	2.199,23	80	2.419,15	80	8.616,99		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				mendapat ASI eksklusif																	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga				75		80	30,00	85	30,00	90	33,00	95	36,30	95	129,30		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesling di puskesmas				30		35	958,14	40	958,14	45	1.053,95	50	1.159,35	50	4.129,58		
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Presentase Pembinaan untuk meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara 5 tatanan						100	220,28	100	220,28	100	242,31	100	266,54	100	949,43		
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar						70	967,83	80	967,83	90	1.064,61	100	1.171,07	100	4.171,35		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase cakupan PHBS di lima tatanan	59					60	920,00	65	920,00	70	1.012,00	75	1.113,20	75	3.965,20		
			<b>Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase puskesmas dengan minimal 80 % posyandu aktif						100	700,00	100	700,00	100	770,00	100	847,00	100	3.017,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan promosi kesehatan					200	700,00	200	700,00	200	770,00	200	847,00	200	3.017,00		
				<b>Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengadaan media promosi kesehatan					1	150,00	1	150,00	1	165,00	1	181,50	1	646,50		
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta kampanye germas					650	150,00	650	150,00	650	165,00	650	181,50	650	646,50		
				<b>Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Desa/kelurahan siaga aktif meningkat satu tingkat strata diatasnya					13	70,00	13	70,00	13	77,00	13	84,70	13	301,70		
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta rakerkesda					52	70,00	52	70,00	52	77,00	52	84,70	52	301,70		
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		100					267.678,17		267.678,17		287.153,52		308.211,80		1130721,65		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												100	121.82 9,00	100	121.82 9,00	100	134.011 ,90	100	147.413 ,09		525.082,9 9			
												100	145.84 9,17	100	145.84 9,17	100	160.434 ,08	100	176.477 ,49		628.609,9 1			
													251,19	150	251,19	150	276,30	150	303,93		1.082,61			
												8/203	70,00	8/203	70,00	8/203	77,00	8/203	84,70	8/203	301,70			
												30	150,00	30	150,00	30	165,00	30	181,50	30	646,50			
												120	31,19	120	31,19	120	34,30	120	37,73	120	134,41			
													119.92 3,43		119.92 3,43		131.915 ,78		145.107 ,36		516.870,0 0			
												12	118.16 9,93	12	118.16 9,93	12	129.986 ,93	12	142.985 ,62	12	509.312,4 2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Kontrak Kerja yang diberikan honorarium						12	1.713,00	12	1.713,00	12	1.884,30	12	2.072,73	12	7.383,03		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah peserta pertemuan						160	40,50	160	40,50	160	44,55	160	49,01	160	174,56		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								14,00		14,00		15,40		16,94		60,34		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT						2	14,00	2	14,00	2	15,40	2	16,94	2	60,34		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								427,73		427,73		470,51		517,56		1.843,52		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik						8/208	7,00	8/208	7,00	8/208	7,70	8/208	8,47	8/208	30,17		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor						3	19,46	3	19,46	3	21,41	3	23,55	3	83,87		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor						28	126,00	28	126,00	28	138,60	28	152,46	28	543,06		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan						16	66,00	16	66,00	16	72,60	16	79,86	16	284,46		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan						96	9,00	96	9,00	96	9,90	96	10,89	96	38,79		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah peserta pertemuan						1925	200,27	1925	200,27	1925	220,30	1925	242,33	1925	863,18		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								484,30		484,30		532,73		586,00		2.087,33		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan bermotor roda 4						1	484,30	1	484,30	1	532,73	1	586,00	1	2.087,33		
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								500,80		500,80		550,88		605,96		2.158,44		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan internet						12	155,02	12	155,02	12	170,52	12	187,57	12	668,12		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor						12	345,78	12	345,78	12	380,36	12	418,39	12	1.490,31		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								227,55		227,55		250,31		275,34		980,74		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan (Roda 2 dan roda 4) yang dibayarkan pajaknya						84	220,55	84	220,55	84	242,61	84	266,87	84	950,57		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan						10	7,00	10	7,00	10	7,70	10	8,47	10	30,17		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1	020109	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan					2	70	4	70	6	77	8	65	18	282							
		1	02010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan					5	303	7	303	10	333	14	366	36	1.305							
		1	02011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan					1	20	3	20	5	22	5	24	14	86							
		1	02012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilengkapi sarananya					50	6.034	55	6.034	60	6.638	67	7.302	67	26.008							
		1	02013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilengkapi prasarananya					67	18.522	67	18.522	67	20.374	67	22.412	67	79.829							
		1	02014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilengkapi Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediknya					7	5.131	7	5.131	10	5.645	15	6.209	39	22.117							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	2	2	2	0	1	5						9	86	10	86	15	60	20	66	54	298		
		1	0	0	0	0	1	6						43	4.754	43	4.754	43	5.230	43	5.753	43	20.491		
		1	0	0	0	0	1	7						68	9.613	68	9.613	68	10.575	68	11.632	68	41.434		
		2	0	0	0	0	1	8						2	39	2	36	4	40	4	44	12	159		
		3	0	0	0	0	1	9						2	43	2	43	4	47	4	40	12	173		
		4	0	0	0	0	1	0						68	127	68	127	68	140	68	154	68	548		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02	02	01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar					67	45	69	45	69	39	70	41	70	170			
		1	02	02	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu					73	16.516	69	16.416	57	18.058	33	19.864	33	70.854	DINKE S dan jajarannya Dan RS		
							Jumlah Kematian Bayi					276	837	243	837	228	921	200	1.013	200	3.609	DINKE S dan jajarannya Dan RS			
							Jumlah Kasus Stunting					17,2	5.519	15,8	5.519	14,4	6.071	13,00	6.678	13,00	23.788	DINKE S dan jajarannya dan BKKBN			
							Jumlah Rumah Tangga Sehat					55%	121.297	57%	118.584	60%	130.414	65%	143.443	70%	513.738	DINKE S dan Puskesmas			
							Jumlah penemuan penyakit menular sesuai SPM (TB dan HIV)					80%	750	80%	750	80%	825	80%	908	80%	3.233				
							Jumlah penemuan penyakit menular yang berpotensi KLB atau Wabah					100%	2.849	100%	2.849	100%	3.133	100%	3.447	100%	12.277				
							Jumlah penemuan penyakit tidak menular sesuai SPM (ODGJ,					40%	548	50%	548	60%	603	70%	663	75%	2.363				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Hipertensi, DM)																			
		1	02201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100%	500	100%	500	100%	550	100%	605	100%	2.155							
		1	02202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					90%	15.916	90%	15.916	92%	17.508	95%	19.259	95%	68.599							
		1	02203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100%	837	100%	837	100%	921	100%	1.013	100%	3.609							
		1	02204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100%	3.520	100%	3.520	100%	3.872	100%	4.259	100%	15.171							
		1	02205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					90%	2.843	100%	30	100%	33	100%	36	100%	2.942							
		1	02206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					25	100	50	100	75	110	100	121	100	431							
		1	02207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					80%	70	85%	70	90%	77	100%	85	100%	302							



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	020202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK					67	30	67	30	67	33	67	36	67	129	Dinkes				
						Jumlah Kebugaran ASN					500 ASN	-	1000 ASN	-	1500 ASN	-	2000 ASN	-	2000 ASN	-					
		1	020202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF					285 desa	958	320 Desa	958	442	1.054	442	1.159	442	4.130	Dinkes				
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					67	-	67	-	67	-	67	-	67	-					
		1	020202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan promosi kesehatan					67	968	67	968	67	1.065	67	1.171	67	4.171					
		1	020202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan dan atau pembinaan					67	57	67	57	67	63	67	69		245					
		1	020202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi					100	150	100	150	100	165	100	182	100	647					
		2	020202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50	46	50	46	75	46	75	37	100	175					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan deteksi dini kesehatan jiwa dan NAPZA					10	342	15	342	20	376	30	414	50	1.475						
		1	02223	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Orang yang mendapatkan Upaya pelayanan Kesehatan Khusus					100	150	100	150	100	165	100	182	100	647						
		1	02224	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah kejadian krisis kesehatan yang mendapatkan penanganan sesuai standar					100	750	100	750	100	825	100	908	100	3.233						
		1	02225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus yang mendapatkan upaya penanganan sesuai standar akibat penyakit menular dan tidak menular					100	409	100	409	100	450	100	495	100	1.763						
		1	02226	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk yang dibayarkan premi Jaminan Kesehatannya					142.000	56.165	148.000	56.165	152.000	61.782	156.000	67.960		242.073						
		1	02228	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang terkirim	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang terkirim					100	124	100	124	100	136	100	150	100	533						
		1	02229	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan Swastis yang dilaksanakan					6 tatanan	421	6 tatanan	421	7 Tatanan	463	9 Tatanan	509	9 Tatanan	1.813	Dinkes					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	0	0	0	3	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan telemedicine					0	39	5	39	21	43	42	47	42	168			
		1	0	0	0	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dipenuhi kebutuhan operasionalnya					0	40	1	40	1	21	2	23	2	124			
		1	0	0	0	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan operasionalnya					67	51.546	67	51.546	67	56.701	67	62.371	67	222.163			
		1	0	0	0	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dipenuhi kebutuhan operasionalnya					0	1.117	1	1.117	1	1.229	1	1.352	1	4.815			
		1	0	0	0	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi utama					18%	4.522	20%	4.522	30%	4.974	40%	5.472	50%	19.490	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan		
		1	0	0	0	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang teridentifikasi dan mendapatkan pelayanan kesehatan					100	1.145	100	1.145	100	1.260	100	1.385	100	4.935			
		1	0	0	0	3	Pelaksanaan Kewaspadaan	Jumlah Upaya Penanganan					100	476	100	476	100	524	100	576	100	2.053			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02	02	04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang Memenuhi Standar Pelayanan					6	104	7	104	7	114	8	125	8	446			
		1	02	02	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi mutu pelayanan					69	105	69	105	69	113	70	122	70	445			
		1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Fasilitasi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi					70	142	75	142	80	156	90	172	90	613			
						Persentase Tenaga Kesehatan yang Berizin							75	24.071	80	24.071	85	26.479	95	29.126	95	103.748			
		1	02	03	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi					72,5	24.071	78	24.071	83	26.479	93	29.126	93	103.748			
						Jumlah Tenaga Kesehatan yang Berizin							5884	-	5884	-	5884	-	5884	-	5884	-	-		
		1	02	03	02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disusun					1 dokumen	805	1	805	1	807	1	900	1	3.317			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	020202	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dipenuhi sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang memenuhi 9 Jenis Tenaga Kesehatan					11	23.206	25	23.206	40	25.605	80	28.154	80	100.171					
		1	020203	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang dilakukan pembinaan					5	60	8	60	15	66	25	73	25	259						
		1	020303	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diselenggarakan					10	142	15	142	20	156	25	172	25	613						
		1	020303	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan					10	142	15	142	20	156	25	172	25	613						
		1	0204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang sesuai standar					30%	350	50%	350	60%	385	70%	424	70%	1.509						
		1	0204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan					30%	551	50%	551	60%	606	70%	667	80%	2.374						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							yang sesuai Standar																			
							Persentase IRTP yang sesuai standar				100%	20	100%	20	100%	22	100%	24	100%	86						
		1 0 2 0 4 0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Farmasi yang berizin dan Sesuai Standar						60	250	65	250	65	275	65	302	255	1.078						Dinas Kesehatan	
				Jumlah Sarana Optikal yang berizin dan Sesuai Standar						0	-	5	-	10	-	10	-	25								
		1 0 2 0 4 0 1 0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Kefarmasian yang dibina dan diawasi						100 sarana	100	100 sarana	100	100 sarana	#VALUE!	120 sarana	#VALUE!	420 sarana	#VALUE!						Dinas Kesehatan	
				Jumlah Sarana Optikal yang dibina dan diawasi						0	-	5 sarana	-	10 sarana	-	10 sarana	-	25 sarana	-							
		1 0 2 0 4 2 0 1 0 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Jumlah data perizinan yang tervalidasi						1 data	50	1 data	50	1 data	55	1 data	56	4 data	211						Dinas Kesehatan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	0	0	0	0	0	1						200	100	300	100	400	110	500	121	500	431		
		1	0	0	0	0	0	4						10	20	15	20	20	22	25	24	25	86	Dinkes	
		1	0	0	0	0	0	4						10	20	15	20	20	22	25	24	25	86		
		1	0	0	0	0	0	6						200	551	300	551	400	606	500	667	500	2.374	Dinkes	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										2019		2020		2021		2022		2023				2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02	05	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi yang Dimanfaatkan					4	150	4	150	4	165	4	182	4	647			
		1	02	05	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang meningkat stratanya					30% dari sasaran UKBM (Posyandu dan Desa Siaga)	70	40	70	50	77	60	85	70	302			
		1	02	05	03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis UKBM yang dilaksanakan					67	70	67	70	67	77	67	85	67	302			
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (Renstra, Renja)					100	251	100	251	100	276	100	304	100	1.083			
								Persentase realisasi anggaran					90	120.418	91	120.418	92	132.460	93	145.705	93	519.000			
								Persentase pegawai yang mengisi SIM ASN dengan lengkap					40	1.160	60	1.160	70	1.276	90	1.404	90	5.000			
								Persentase Fasilitas Kesehatan BLUD dengan Nilai IKM Kategori Baik dan atau Sangat Baik					100% Baik	145.849	100% Baik	145.849	100% Sangat Baik	153.142	100% Sangat Baik	160.799	100% Sangat Baik	605.639			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						251		251		276		304		1.083				
		1	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			8	70	8	70	8	77	8	85	8	302						
		1	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun			6	150	6	150	6	165	6	182	6	647						
		1	02	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang ditindak lanjuti			2	31	2	31	2	34	2	38	2	134						
		1	02	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan			100%	119.923	100%	119.923	100%	131.916	100%	145.107	100%	516.870						
		1	02	01	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen rincian gaji dan tunjangan ASN yang tersusun			14	118.170	14	118.170	14	129.987	14	142.986	14	509.312						
		1	02	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen rincian honorarium ASN yang tersusun			14	1.713	14	1.713	14	1.884	14	2.073	14	7.383						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
							umum yang tersusun																				
		102010601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						6 jenis	7	6 jenis	7	6 jenis	8	6 jenis	8	6 jenis	30								
		102010602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia						4 jenis	19	5 jenis	19	6 jenis	21	6 jenis	24	6 jenis	84								
		102010604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia						12	126	12	126	12	139	12	152	12	543								
		102010605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia						12	66	12	66	12	73	12	80	12	284								
		102010606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia						12	9	12	9	12	10	12	11	12	39								
		102010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara						24	200	24	200	24	220	24	242	24	863								
		1020107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun						100%	484	100%	484	100%	533	100%	586	100%	2.087								
		1020107	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia						6	459	0	459	1	503	2	551	2	1.972								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02107	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya					1	100	1	100	1	100	1	100	4	400					
		1	02107	1	<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dibangun</b>					0	80	-	80	1	86	1	90	1	336					
		1	02107	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia					0	50	-	50	1	53	1	55	1	208					
		1	02107	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia					12	30	12	30	12	33	12	35	12	128					
		1	02108	1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>					12	501	12	501	12	551	12	606	12	2.158					
		1	02108	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan					12	155	12	155	12	171	12	188	12	668					
		1	02108	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia					12	346	12	346	12	380	12	418	12	1.490					
		1	02109	1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun</b>					100%	138	100%	138	100%	153	100%	173	100%	602					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	02	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan					45	42	45	42	45	63	45	86	45	232			
		1	02	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara					10	7	10	7	10	8	10	8	10	30			
		1	02	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi					2	89	2	89	2	83	2	79	2	340			
		1	02	01	10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan BLUD dengan kinerja keuangan sesuai standar</b>					68	145.849	68	145.849	68	153.142	68	160.799	68	605.639			
								<b>Jumlah Fasilitas Kesehatan BLUD dengan Nilai IKM Kategori Baik / Sangat Baik</b>										-	-	-	-	-			
					10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bagendit	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Bagendit sesuai standar					7	2.078	7	2.078	7	2.161	7	2.269	7	8.746			
								Nilai IKM Puskesmas Bagendit					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
					02		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Balubur Limbangan DTP	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Balubur Limbangan					7	6.942	7	6.942	7	7.290	7	7.674	7	28.828			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					DTP sesuai standar																		
					Nilai IKM Puskesmas Balubur Limbangan DTP					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-				
				03	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Banjarwangi	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Banjarwangi sesuai standar				7	4.207	7	4.207	7	4.417	7	4.638	7	17.468				
					Nilai IKM Puskesmas Banjarwangi					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-				
				04	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bayongbong DTP	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Bayongbong DTP) sesuai standar				7	4.700	7	4.700	7	4.937	7	7.182	7	19.717				
					Nilai IKM Puskesmas Bayongbong DTP					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-				
				7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bojongloa	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Bojongloa sesuai standar				7	1.416	7	1.416	7	1.487	7	1.762	7	7.882				
					Nilai IKM Puskesmas Bojongloa					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-				
				06	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungbulang	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Bungbulang sesuai standar				7	4.368	7	4.368	7	4.787	7	4.816	7	18.139				
					Nilai IKM Puskesmas Bungbulang					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	2.796	7	2.796	7	2.726	7	2.863	7	10.782			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	7.299	7	7.299	7	7.764	7	7.842	7	22.004			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.903	7	1.903	7	1.998	7	2.098	7	7.901			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.769	7	1.769	7	1.877	7	1.950	7	7.344			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	347	7	347	7	364	7	382	7	1.440			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Citeras sesuai standar																	
				Nilai IKM Puskesmas Citeras						Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
			24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gadog	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Gadog sesuai standar					7	1.478	7	1.478	7	1.729	7	1.607	7	6.048		
				Nilai IKM Puskesmas Gadog						Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
			27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Garawangsa	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Garawangsa sesuai standar					7	1.370	7	1.370	7	1.439	7	1.711	7	7.690		
				Nilai IKM Puskesmas Garawangsa						Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
			26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Guntur	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Guntur sesuai standar					7	2.188	7	2.188	7	2.295	7	2.410	7	9.076		
				Nilai IKM Puskesmas Guntur						Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
			27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Haurpanggung	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Haurpanggung sesuai standar					7	1.241	7	1.241	7	1.304	7	1.369	7	7.177		
				Nilai IKM Puskesmas Haurpanggung						Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
			28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kadungora	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Kadungora sesuai standar					7	3.019	7	3.019	7	3.170	7	3.329	7	12.738		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.293	7	1.293	7	1.377	7	1.427	7	7.368			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	2.974	7	2.974	7	3.101	7	3.277	7	12.268			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	705	7	705	7	740	7	777	7	2.928			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	974	7	974	7	1.022	7	1.073	7	4.043			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	911	7	911	7	977	7	1.004	7	3.783			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												7	674	7	674	7	707	7	743	7	2.798		
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
												7	911	7	911	7	977	7	1.005	7	3.784		
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
												7	903	7	903	7	948	7	997	7	3.749		
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
												7	1.678	7	1.678	7	1.741	7	1.828	7	6.887		
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
												7	898	7	898	7	943	7	990	7	3.730		
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-		
												7	2.473	7	2.473	7	2.777	7	2.704	7	10.187		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						DTP sesuai standar																			
						Nilai IKM Puskesmas Pameungpeuk DTP					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-					
					47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pamulihan	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Pamulihan sesuai standar				7	779	7	779	7	608	7	639	7	2.407					
						Nilai IKM Puskesmas Pamulihan					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-					
					46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasundan	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Pasundan sesuai standar				7	2.714	7	2.714	7	2.850	7	2.992	7	11.270					
						Nilai IKM Puskesmas Pasundan					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-					
					47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pembangunan	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Pembangunan sesuai standar				7	2.101	7	2.101	7	2.208	7	2.318	7	8.723					
						Nilai IKM Puskesmas Pembangunan					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-					
					48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Peundeuy	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Peundeuy sesuai standar				7	2.048	7	2.048	7	2.171	7	2.278	7	8.706					
						Nilai IKM Puskesmas Peundeuy					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.479	7	1.479	7	1.773	7	1.631	7	6.141			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.199	7	1.199	7	1.279	7	1.322	7	4.979			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	2.874	7	2.874	7	3.018	7	3.169	7	11.936			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	469	7	469	7	492	7	717	7	1.947			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
												7	1.373	7	1.373	7	1.421	7	1.492	7	7.619			
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra dan Pagu Indikatip (Rp)														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
					66	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalgede	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Tegalgede sesuai standar					7	1.347	7	1.347	7	1.413	7	1.483	7	7.787			
							Nilai IKM Puskesmas Tegalgede					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
					67	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wanaraja DTP	Jumlah Laporan Keuangan Puskesmas Wanaraja DTP sesuai standar					7	2.378	7	2.378	7	2.473	7	2.797	7	9.782			
							Nilai IKM Puskesmas Wanaraja DTP					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			
					68	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD LABKESDA	Jumlah Laporan Keuangan LABKESDA sesuai standar					7	188	7	188	7	197	7	207	7	779			
							Nilai IKM LABKESDA					Baik	-	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berlandaskan pada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk lima tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>								
1	Angka Harapan Hidup	71,36	71,69	71,63 - 71,74	71,76 - 71,89	71,89 - 72,02	72,03 - 72,16	72,03 - 72,17
2	Indeks Keluarga Sehat	0,07	0,07	0,08	0,1	0,15	0,2	0,2
3	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A
<b>Permendagri 18 Tahun 2020 tentang (Outcome)</b>								
4	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
5	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	83,33%	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,00%	85%	90%	90%	92%	95%	95%
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40,23%	78%	85%	90%	95%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024		
12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,7	15	25	35	45	60	60	
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18,1	20	30	40	50	60	60	
15	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	30	40	50	60	70	75	75	
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	55	60	65	80	90	90	
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	50	60	70	80	90	100	100	
<b>Permendagri 18 Tahun 2020 (Output)</b>									
18	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
19	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	83,33%	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	101,2	100	100	100	100	100	100
21		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	98,09%	100	100	100	100	100	100
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	75%	100	100	100	100	100	100
23		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	80%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	70%	100	100	100	100	100	100
25		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	75%	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60%	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
27		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita seesuai standar	70%	100	100	100	100	100	100
28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	70%	100	100	100	100	100	100
29		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasae sesuai standar	90%	100	100	100	100	100	100
30	Persentase oran usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	203 Posbindu Kit	300 Posbindu Kit	500 Posbindu Kit	600 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit
31		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Nakes	80 Nakes	70 Nakes				
32	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65%	100	100	100	100	100	100
33		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70%	100	100	100	100	100	100
34	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	203 Posbindu Kit	300 Posbindu Kit	500 Posbindu Kit	600 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit	1000 Posbindu Kit
35		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Nakes	80 Nakes	70 Nakes				
36	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan sesuai standar	200.000 pcs Stick Gula Darah	248.000 pcs Stick Gula Darah	300.000 pcs Stick Gula Darah	350.000 pcs Stick Gula Darah	400.000 pcs Stick Gula Darah	500.000 pcs Stick Gula Darah	500.000 pcs Stick Gula Darah
37		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Nakes	80 Nakes	70 Nakes				
38	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	1 Kendaraan Operasional Rujukan	2 Kendaraan Operasional Rujukan	2 Kendaraan Operasional Rujukan	2 Kendaraan Operasional Rujukan	3 Kendaraan Operasional Rujukan	3 Kendaraan Operasional Rujukan
39		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Nakes	80 Nakes	70 Nakes				
40	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 unit Diagnostic TCM	10 unit Diagnostic TCM	12 unit Diagnostic TCM	12 unit Diagnostic TCM	15 unit Diagnostic TCM	15 unit Diagnostic TCM	15 unit Diagnostic TCM
41		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Nakes	90 Nakes	100 Nakes	100 Nakes	110 Nakes	120 Nakes	120 Nakes

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
42	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 RS Rujukan	2 RS Rujukan	2 RS Rujukan	2 RS Rujukan	2 RS Rujukan	2 RS Rujukan	2 RS Rujukan
43		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Nakes	90 Nakes	100 Nakes	100 Nakes	110 Nakes	120 Nakes	120 Nakes
<b>Permendagri 17 Tahun 2021</b>									
44	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		85,42	109,05	88,67	78,75	67,08	66,68	56,25
45	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun			5	6	5	6	3	6
46	Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan		82,07	87,09	90,09	92,05	95	100	100
47	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		27,03	27,03	20,05	17,05	15,08	14	13
48	Prevelensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)		5,0%	4,7%	4,4%	4,0%	3,8%	3,6%	3,5%
49	insidensi TB per 100.000 penduduk		317	300	260	200	150	100	100
50	insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		98,%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
51	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)		50%	60%	75%	80%	90%	100%	100%
52	treatment coverage pada pasien TB		60	70	80	90	90	90	90
53	presentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan		86.2%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
54	presentasi puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		10	10	15	40	71	83	83
55	presentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun		15%	12%	10%	10%	10%	5%	5%
56	jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)		50%	65%	75%	100%	100%	100%	
58	presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		30%	50%	60%	70%	75%	80%	80%
59	presentase sarana produksi UMOT		0	0	50%	60%	70%	75%	75%
<b>SPM Kesehatan</b>									
60	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		98,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		87,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		99,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
64	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	60	70	80	90	90	100	100%
66	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	15	25	35	45	60	100	100
68	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30	40	50	60	70	80	80
69	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	40	50	60	70	75	80	80
70	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	80	80	80	80	80	80	80
71	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	80	90	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Garut berlaku selama lima tahun dari Tahun 2019 hingga 2024. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Garut merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan berlaku untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Garut.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

